

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian**

##### **1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLH) Kota Bandung**

Secara umum, Badan pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung merupakan kepanjangan tangan dari Wali Kota Bandung yang memiliki kewajiban untuk mengurus hal ikhwal yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Sekretariat BPLH Kota Bandung sendiri berkedudukan di Jl. Sadang Serang Tengah Nomor 4 & 6 Bandung, Jawa Barat. Pada periode 2013-2018 ini, BPLH dipimpin oleh Bapak Mohamad Salman Fauzi, S.Ip M.Si.

##### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPLH Kota Bandung**

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung mempunyai tugas pokok yaitu “menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BPLH Kota Bandung mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup perencanaan lingkungan hidup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.

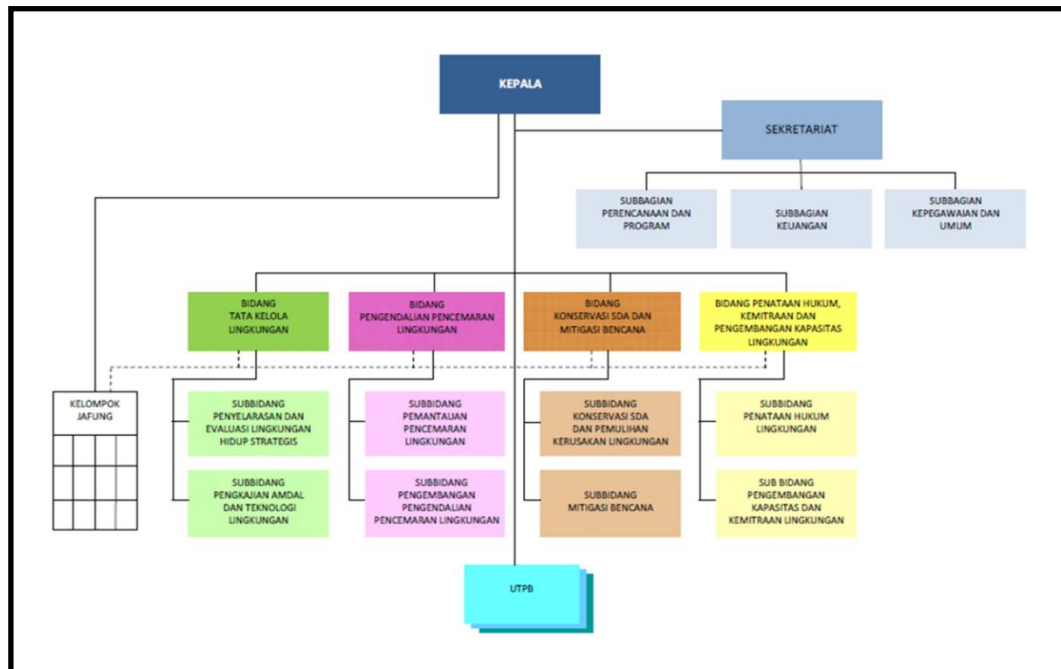
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan WaliKota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

Sehubungan dengan tugas pokok yang diemban oleh BPLH Kota Bandung tersebut, disusun berdasarkan peraturan WaliKota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang struktur organisasi BPLH Kota Bandung sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung, membawahi :
- 2) Sekretaris, membawahi :
  - a) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b) Kepala Sub. Bagian Keuangan.
- 3) Kepala Bidang Perencanaan, membawahi :
  - a) Kepala Sub. Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup.
  - b) Kepala Sub. Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
  - a) Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara;
  - b) Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah;
- 5) Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi, membawahi:
  - a) Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Air Tanah;
  - b) Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati;
- 6) Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi :
  - a) Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati;
  - b) Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah;

Adapun untuk lebih jelasnya, struktur organisasi BPLH Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BPLH Kota Bandung**



*(sumber: Rencana Strategik BPLH Kota Bandung 2013-2018)*

Dalam rangka memperlancar tugas pokok BPLH Provinsi Jawa Barat, maka masing-masing bidang dalam struktur organisasi BPLH Provinsi Jawa Barat mengemban tugas pokok dan fungsi yang lebih rinci. Tugas pokok dan fungsi dari kepala badan, sekretaris dan masing-masing bidang disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris dan Bidang-Bidang BPLH Provinsi Jawa Barat**

NO.	UNSUR	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	<b>Kepala Badan</b>	Merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan serta	a. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebiDinin teknis operasional di bidang tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi sda dan mitigasi bencana serta

		mengkordinasikan dan membina UPTB	<p>penaatan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;</p> <p>b. Merumuskan dan menetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>c. Fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.</p> <p>e. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTB</p>
2	<b>Sekretariat</b>	Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum	<p>a. Pengkoordinasian perencanaan dan program Badan;</p> <p>b. Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;</p> <p>c. Pengelolaan urusan Keuangan, kepegawaian dan umum.</p>
3	<b>Bidang Tata Kelola Lingkungan</b>	Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi tata kelola lingkungan	<p>a. Pengkajian bahan kebijakan operasional tata kelola lingkungan;</p> <p>b. Pengkajian bahan fasilitasi tata kelola lingkungan;</p> <p>c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang tata kelola lingkungan.</p>
4	<b>Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan</b>	Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan	<p>a. Pengkajian bahan kebijakan operasional pengendalian pencemaran lingkungan;</p> <p>b. Pengkajian bahan fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan;</p> <p>c. Penyelenggaraan fasilitasi</p>

			bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
5	<b>Bidang Konservasi SDA Dan Mitigasi Bencana</b>	Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konservasi SDA dan mitigasi bencana	a. pengkajian bahan kebidin teknis konservasi SDA dan mitigasi bencana; b. pengkajian bahan fasilitasi konservasi SDA dan mitigasi bencana; c. penyelenggaraan fasilitasi bidang konservasi SDA dan mitigasi bencana.
6	<b>Bidang Penataan Hukum, Kemitraan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan</b>	Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan	a. pengkajian bahan kebidin teknis penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan; b. pengkajian bahan fasilitasi penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan; c. penyelenggaraan fasilitasi bidang penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan.

(sumber: Rencana Strategik BPLH Kota Bandung 2013-2018)

#### **b. Sumber Daya BPLH Kota**

##### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki BPLH Kota Bandung terdiri dari pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

##### 2) Pegawai

Data Pegawai BPLH Kota Bandung berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat, golongan dan ruang per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pegawai BPLH Kota Bandung**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretariat	18
3.	Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup	12
4.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	11
5.	Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi	10
6.	Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup	8
Jumlah		60

*(sumber: Rencana Strategik BPLH Kota Bandung 2013-2018)*

Sebagai salah satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme, maka sebagian besar sumberdaya manusia aparatur pegawai BPLH Kota Bandung diupayakan berpendidikan sarjana. Tabel berikut menyajikan komposisi pegawai BPLH Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 4.3**  
**Komposisi Pegawai BPLH Kota Bandung**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan, Status 2013**

N O.	PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SD		1			1
2	SMP					5
3	SLTA		3			3
4	Sarjana Muda/Akademi		2	3		5
5	Strata 1 (S1)			32		32
6	Strata 2 (S2)			9	4	13
7	Strata 3 (S3)				1	1
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>60</b>

*(sumber: Rencana Strategik BPLH Provinsi Jawa Barat 2013-2018)*

Disamping jumlah pegawai tersebut, BPLH Kota Bandung juga merekrut Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak 3 orang (tercatat dalam data base) dan sejumlah personil kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

### 3) Sumber Daya Lainnya

Agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPLH Kota Bandung didukung pula oleh sejumlah sumber daya lainnya, yaitu:

- a) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi yang akan memudahkan dalam berkomunikasi (LAN dan Internet) dengan berbagai pihak didalan dan diluar negeri. Fasilitas yang tersedia diantaranya jaringan komputer baik internet maupun intranet, faksimil dan telepon, yang bisa mempercepat dan mempermudah penyampaian informasi;
- b) Sarana dan prasarana perpustakaan yang dimiliki oleh BPLH Kota Bandung relatif lengkap yang dapat dijadikan referensi data dan informasi sebagai input dalam pengendalian lingkungan.

#### c. Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran BPLH Kota Bandung

##### 1) Visi dan Misi BPLH Kota Bandung

Visi merupakan tujuan akhir yang akan dicapai oleh suatu organisasi untuk mencapai citacita yang diinginkan. Dalam konteks ini, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh organisasi BPLH sebagai perangkat daerah Kota Bandung untuk bidang lingkungan hidup adalah mewujudkan lingkungan Kota Bandung yang bisa mendukung terwujudnya visi Kota Bandung yaitu “**Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera**”.

Penetapan visi BPLH dilakukan dengan memperhatikan isu lingkungan strategis yang saat ini dihadapi oleh Kota Bandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kota Bandung yang dinyatakan dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018; serta tugas pokok dan fungsi. Visi BPLH ditetapkan sebagai berikut: “**Bandung Ramah Lingkungan menuju Kota Nyaman dan Berkelanjutan (Sustainable City)**”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bandung, berarti Pemerintah Kota Bandung termasuk di dalamnya BPLH Kota Bandung, penduduk Kota dan warga lainnya yang tinggal di Bandung ataupun melakukan kegiatan di Kota Bandung.
- 2) Ramah lingkungan, berarti memiliki perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan hidup sehingga timbul aktivitas-aktivitas yang bersifat melindungi/menjaga, memelihara dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup di sekitarnya.
- 3) Menuju Kota Nyaman, berarti Kota yang menyenangkan untuk dijadikan tempat tinggal khususnya karena kualitas lingkungannya
- 4) Berkelanjutan (Sustainable City), yaitu Kota yang dalam pembangunannya tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, akan tetapi juga mempertimbangkan pula aspek lingkungan dan sosial dengan proporsi yang seimbang dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan misi BPLH yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi, merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dan dengan tetap memperhatikan isu lingkungan strategis, serta tantangan ke depan, ditetapkan 3 (tiga) misi BPLH, yaitu:

- 1) Meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta dampak negatif perubahan iklim
- 2) Meningkatkan upaya rehabilitasi lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan perusakan serta dampak negatif perubahan iklim
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup

Ketiga misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Misi Pertama,** Dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta dampak negatif perubahan iklim maka kondisi lingkungan hidup Kota Bandung diharapkan tercegah dari bahaya



pencemaran, merusak maupun dampak negatif perubahan iklim yang lebih besar atau berat.

**Misi Kedua**, Dengan meningkatkan **upaya rehabilitasi** lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan, maka kondisi lingkungan hidup Kota Bandung **diharapkan terlindungi** kelestarian dan fungsinya.

**Misi Ketiga**, Dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan BPLH Kota Bandung maka pembangunan lingkungan hidup di Kota Bandung lebih dipercaya dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

a) Tujuan dan Sasaran

Ketiga Misi tersebut di atas masing-masing memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran yang terkandung dalam RPJMD Kota Bandung khususnya pada aspek lingkungan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPLH Kota Bandung dan isu-isu strategi lingkungan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah BPLH Kota Bandung berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 5 tahun ke depan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel 4.4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan BPLH Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim terhadap lingkungan hidup	1.1. Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
			Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
			Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas IV golongan B	12,50 %	17,00 %	17,00%	17,00 %	17,00%
		1.2. Berkurangnya timbulan sampah pada tempat-tempat pembuangan sampah	Cakupan sampah yang dikelola secara <i>Landfill</i>	69 %	65 %	58 %	34 %	25 %
			Cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	18 %	20 %	22 %	25 %	30 %
			Cakupan sampah dikonversi menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan	1 %	4 %	15 %	30 %	35 %
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Terehabilitasi SDA dan LH dari pencemaran, perusakan dan dampak negatif perubahan iklim	2.1. Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat	-31,30	-31,27	-31,24	-31,21	-31,18
			Jumlah sumber air yang telah dipulihkan akibat pencemaran	1 titik mata air dan 2 sungai	1 titik mata air dan 2 sungai	1 titik mata air dan 2 sungai	1 titik mata air dan 2 sungai	1 titik mata air dan 2 sungai
3.	Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan & kinerja penyelenggaraan urusan Bidang Lingkungan Hidup	3.1 BPLH mendapatkan penilaian pengelolaan Keuangan dan kinerja yang wajar dan baik	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

(sumber: Rencana Strategik BPLH Kota Bandung 2013-2018)

#### d. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan

Rencana program merupakan penjabaran dari strategi dan kebiDinin pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan misi BPLH Kota Bandung. Program adalah instrument kebiDinin yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPLH Kota Bandung atau instansi terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Adapun indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Sementara kelompok sasaran adalah sasaran yang menjadi oAMek kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan Pendanaan indikatif adalah perkiraan dana yang dibutuhkan serta sumber-sumber pendanaan. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

## **2. BAPPEDA Kota Bandung**

### **a. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu: Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi Kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Bandung.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Bappeda adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, sebagai visi Kota Bandung harus menjadi acuan dan pedoman tidak saja bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya akan tetapi menjadi spirit seluruh warga Kota dalam membangun Kotanya.
- 2) Pencapaian 100 gagasan WaliKota untuk Bandung.
- 3) Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan agen utama perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi SKPD terkait dan dalam proses pengambilan kebiDinin Pemerintah Kota;
- 5) Tingginya Kapasitas warga Kota Bandung belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga Kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Misi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah "LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF DAN APLIKATIF GUNA MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA". Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus

berkualitas, sehingga segala rumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural. Dalam kaitannya dengan Bappeda sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1). Berkualitas artinya dalam penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, politik menggunakan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) . Aspiratif artinya dalam penyusunan dokumen perencanaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan.
- 3). Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholder* untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan

semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai;
- 3) Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan hasil reviu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berikut merupakan Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 hasil Reviu:

**Tabel 4.5**  
**Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2014-2018 (Setelah Reviu)**

No	Misi (Sebelum Reviu)	Misi (Sesudah Reviu)
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Aspiratif, dan Aplikatif
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai;	
3	Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal; dan	Meningkatkan iklim investasi di Kota Bandung
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas tata kelola yang baik

*(Rencana Strategis BAPPEDA Kota Bandung Tahun 2013- 2018)*

#### **b. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan**

Rencana program merupakan penjabaran dari strategi dan kebiDinin pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kota Bandung. Program adalah instrument kebiDinin yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Bandung atau instansi terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Adapun indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Sementara kelompok sasaran adalah sasaran yang menjadi obyek kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan Pendanaan indikatif adalah perkiraan dana yang dibutuhkan serta sumber-sumber pendanaan. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

## **B. Deskripsi Hasil Penulisan**

Penulis membuat instrumen penelitian untuk dijadikan pegangan saat melakukan wawancara di lapangan. Instrumen penelitian harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Dosen Pembimbing. Setelah instrumen penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing, untuk selanjutnya penulis mengurus surat permohonan perizinan penulisan dari Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Surat permohonan perizinan ditujukan sesuai dengan subyek penelitian yakni Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dan Masyarakat Kota Bandung.

Dalam penulisan ini, penulis akan mewawancarai 8 orang yang menjadi subyek penulisan diantaranya, WaliKota Bandung, Kasubid Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Dini Katiah (D) BAPPEDA Kota Bandung, Kasubag program, data, dan informasi Hidup Yati (Y) BPLH Kota Bandung, 5 orang masyarakat Kota Bandung. Berikut nama-nama suAMek penulisan dari masyarakat Kota Bandung, Asep Sumarna (AS) yang berstatus sebagai

mahasiswa, Yan Mahdi (YM) yang berstatus sebagai mahasiswa, Astri Mundari (AM) yang berstatus wirausaha, Yunus Maulana (YM) yang berstatus sebagai anggota organisasi masyarakat dan terakhir Mutiara Melinda (MM) yang berstatus sebagai pemuda Karang Taruna setempat.

### **1. Bentuk Strategi Pemerintah Kota dalam Pembangunan Berbasis Lingkungan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid perencanaan Lingkungan Hidup BPLH Kota Bandung Yati (Y) mengenai bentuk-bentuk strategi dalam pembangunan berbasis lingkungan penulis dapat menggali beberapa informasi terkait hal tersebut. Y memaparkan bahwa yang melatarbelakangi Pembangunan berkelanjutan ialah menurunnya kualitas lingkungan (udara, air, tanah) cenderung mengalami penurunan dan kerusakan, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam realisasi mengatasi permasalahan perlu adanya sebuah strategi yang dapat mendorong kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga dan memelihara Lingkungan Kota Bandung. Melalui inisiatif dari WaliKota tersebutlah lahir sebuah strategi yang dituangkan dalam RPJMD dan renstra pemerintah Kota Bandung.

Selanjutnya menurut Y bahwa strategi dalam melaksanakan program dirumuskan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penampungan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan. Pertama, perumusan dibahas pada saat MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pengembangan) yang ditangani langsung oleh BAPEDDA Kota Bandung karena program Bandung Juara merupakan hajat akbar WaliKota Bandung. Dari hasil Musrenbang tersebut menghasilkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan untuk program Walikota tersebut. Setelah itu dimasukkan ke RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dilanjutkan kepada setiap SKPD di Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, perencanaan strategi dalam program



Bandung Juara sudah baik, hal tersebut ditandai dengan persiapan dan perumusan dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Selanjutnya Y dalam wawancaranya mengutarakan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program BPLH. Faktor-faktor tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya program Bandung Juara tersebut adalah pemanfaatan jumlah SKPD yang banyak, yang dianggap memiliki potensi besar untuk dapat membantu pelaksanaan program Bandung Juara, serta ditunjang oleh APBD yang besar untuk tahun anggaran sekarang. Sedangkan untuk eksternal faktor yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya program ini adalah Adanya dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, khususnya dari Walikota. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, kerjasama antara pemerintah Daerah dengan organisasi masyarakat, pihak swasta sudah cukup baik, terlihat dari banyaknya kegiatan bersama antara pemkot dan swasta dalam pemeliharaan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, tentu saja program ini harus disesuaikan dengan Rencana Strategik BPLH itu sendiri agar terlaksananya program tidak melenceng dari fungsi BPLH itu sendiri sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Bandung. Menurut Y, program Bandung Juara yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Rencana Strategik BPLH itu sendiri. Hal itu dapat dibuktikan dengan RPJMD yang telah disepakati sebelumnya menjadi acuan BPLH dalam pembangunan berkelanjutan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Sebagai contoh dalam salah satu kegiatannya diadakan FGD dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait pemuliharaan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menumbuhkembangkan kompetensi-kompetensi masyarakat dalam memulihkan lingkungan di Kota Bandung. Hal itu disampaikan Y bahwa ada beberapa kompetensi

yang diharapkan baik dari SKPD sebagai pelaksana program, maupun masyarakat yang menjadi sasaran dilaksananya strategi pembangunan berbasis lingkungan. Dalam pelaksanaannya, strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi masing-masing SKPD untuk menunjang segala bentuk program yang diusung langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab, dalam pelaksanaan suatu program pemerintah khususnya program pembangunan berbasis lingkungan semua sektor pasti dilibatkan, karena program pembangunan berbasis lingkungan ini menyangkut hajat orang banyak. Sedangkan kompetensi yang diharapkan dari kegiatan BPLH ini terhadap masyarakat adalah kompetensi peduli, sadar dan bertanggungjawab terhadap pemulihan lingkungan di Kota Bandung. Kompetensi dalam diri masyarakat inilah yang menjadi harapan paling utama dalam pelaksanaan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan secara keseluruhan.

Adapun secara spesifik, kriteria yang diharapkan dapat dimiliki oleh unsur-unsur yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat mampu mengelola sampah dengan baik, mampu memilah sampah dan tidak membuang sampah ke sungai; (2) Para pelaku usaha mampu mengolah limbah kotoran hasil produksi, sehingga kotoran dari lahan perusahaan tidak mencemari lingkungan; (3) Kawasan industri yang sudah pasti memiliki limbah, diberikan bimbingan teknologi supaya mengurangi pencemaran limbah industrinya; (4) Pola tanam di dataran tinggi atau lereng perlu dibenahi dengan cara ditanami oleh tanaman yang berakar tunggang atau berbatang keras bukan oleh tanaman berakar serabut. Sehingga pada saat musim hujan tidak terjadi bencana alam seperti banjir, longsor.

Berkaitan dengan semua perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan berkelanjutan, tentu saja terdapat tujuan utama yang difokuskan secara menyeluruh terhadap aspek-aspek kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Y, tujuan diadakan program pembangunan

berkelanjutan yakni untuk mengubah *mindset* (cara berpikir) masyarakat, yang tadinya tidak berbudaya lingkungan, berubah menjadi berbudaya lingkungan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diperoleh informasi mengenai batasan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan tersebut, yakni hanya sebatas mengubah *mindset* masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggungjawab dalam memulihkan, dan menjaga kebersihan Kota Bandung .

Berkenaan dengan tujuan utama dari strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan tersebut, maka perlu kiranya pelaksanaan strategi tersebut harus sesuai dengan standar kinerja yang ada di BPLH. Hal ini dimaksudkan untuk ketercapaian dari tujuan utama program pembangunan berkelanjutan tersebut. Menurut Y, pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan telah disesuaikan dengan standar kinerja dari pada BPLH itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penyesuaian tupoksi setiap bidang yang ada di BPLH, rencana strategis BPLH dan juga ketentuan yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Selanjutnya, agar pelaksanaan strategi pembangunan berbasis lingkungan dapat mencapai tujuannya maka perlu adanya upaya sosialisasi dari BPLH kepada masyarakat sebagai sasaran utama pada program pembangunan berkelanjutan ini. Menurut Y, adapun bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPLH yakni melalui berbagai media, terutama media cetak, elektronik, dan bekerja sama dengan salah satu stasiun radio untuk terus berupaya dalam sosialisasi kegiatan pada program pembangunan berkelanjutan. Selain itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPLH dalam rangka program pembangunan berkelanjutan selalu dibuat *banner* atau *leafplat* untuk dilihat oleh masyarakat. Namun upaya sosialisasi program pembangunan berkelanjutan tidak berhenti sampai di sana, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPLH berupa penyuluhan, FGD, dll juga merupakan sebagai wadah sosialisasi program pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat. Tentu saja dalam proses sosialisasi program pembangunan

berkelanjutan BPLH menginformasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang terangkai dalam program tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Y, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPLH dalam strategi pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

- a. Pengendalian dan pencegahan polusi udara yang bersumber dari sumber pencemar bergerak maupun tidak bergerak lebih diarahkan kepada peningkatan kesadaran *stakeholder* lingkungan melalui pembinaan dan monitoring.
- b. Pengendalian pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan dampak negatif perubahan iklim diarahkan kepada pembinaan, penanganan pengaduan permasalahan lingkungan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi permasalahan lingkungan.
- c. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi *stakeholder* lingkungan.
- d. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah.
- e. Melakukan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sehingga permasalahan sampah dapat teratasi dan bermanfaat ekonomi.
- f. Meningkatkan pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah.
- g. Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam yang mengalami pencemaran maupun kerusakan sehingga tetap lestari dan kembali berfungsi dengan baik.
- h. Meningkatkan pemenuhan kriteria pelaporan keuangan dan kinerja yang baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada setiap bentuk kegiatan tersebut dalam strategi pembangunan berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seperti yang dipaparkan oleh Y,

faktor yang menjadi pertimbangan pada setiap bentuk kegiatan tersebut dalam strategi pembangunan berbasis lingkungan, yakni faktor kultur masyarakat dan faktor sosial ekonomi. Karena menurut beliau, segala bentuk strategi harus dipertimbangkan dari lokasi dan budaya apa yang melekat pada masyarakat tersebut. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat juga memiliki pengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis lingkungan. Maka pemilihan kegiatan, lokasi dan waktu harus mempertimbangkan bagaimana kondisi dan keadaan dari masyarakat yang akan dijadikan sasaran dalam program tersebut.

Strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan memiliki tujuan utama yakni ingin mengubah *mindset* masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Maka dari itu setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi strategi pemerintah Kota harus terfokus pada tujuan tersebut. Dalam pemaparannya Y menjelaskan bahwa bentuk kegiatan yang sudah terealisasi belum tentu sesuai dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan, karena untuk mengetahui ketercapaian dari sebuah tujuan diperlukan evaluasi langsung terhadap masyarakat setelah selesai kegiatan. Beliau menuturkan sejauh kegiatan yang sudah terealisasi belum pernah ada evaluasi yang dilaksanakan. Hal ini menjadi gambaran bahwa evaluasi menjadi penting untuk dijadikan tolak ukur ketercapaian tujuan dalam pelaksanaan strategi.

Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang di akibatkan pembangunan pemerintah tidak bisa sendiri, tentu memerlukan dukungan dan bantuan dari masyarakat secara aktif. Pada program pembangunan berbasis lingkungan semua bentuk kegiatan di *setting* untuk dapat diikuti dan diterima oleh masyarakat luas, karena masyarakat merupakan sasaran dalam perubahan *mindset* yang dicita-citakan dalam perbaikan pencemaran lingkungan tersebut. Y menegaskan bahwa bentuk kegiatan

dalam implementasi strategi pemerintah Kota sudah mampu menarik partisipasi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah subyek penggerak dari perbaikan lingkungan, maka dalam setiap kegiatan selalu menyisipkan unsur persuasif kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan Kota Bandung.

Konsistensi dan perencanaan yang matang menjadi kunci untuk terealisasi program dengan baik. Maka BPLH sebagai pelaksana kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan harus memiliki dua hal tersebut sebagai pegangannya. Y di sini menuturkan, sejauh ini semua kegiatan dalam program strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan perencanaan dan agenda yang sudah dijadwalkan. Setiap bentuk kegiatan dalam implementasi program strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan harus memiliki kejelasan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut dipaparkan Y, bahwa untuk melaksanakan kegiatan perlu mencari lokasi sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena beliau menyadari untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar, maka bentuk kegiatan selalu diusahakan agar menyentuh masyarakat luas.

BPLH sebagai pelaksana kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan di lapangan perlu melakukan pengawasan yang baik terhadap kegiatan tersebut. Maka Y memaparkan bahwa saat pelaksanaan kegiatan *stakeholder BPLH* dapat mengontrolnya dengan baik, namun mereka tidak memungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan pasti menemukan hambatan/kendala, akan tetapi kerjasama tim menjadikan semuanya lebih cepat teratasi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi penulis, BPLH sebagai pelaksana kegiatan dalam strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis

lingkungan sudah baik, hal tersebut terbukti dari kesigapan setiap anggota dalam menangani kendala saat kegiatan berlangsung. Akan tetapi, pasca pelaksanaan kegiatan masyarakat belum mampu menumbuhkan *civic responsibility* terhadap lingkungan, khususnya pemulihan pencemaran lingkungan Kota Bandung.

Dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam diri masyarakat terhadap lingkungan tentu saja memerlukan proses dan waktu yang panjang. Begitu pun dengan BPLH sebagai pelaksana implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, tidak cukup hanya sebatas merealisasikan kegiatan tanpa adanya *follow up* langsung kepada masyarakat. Y memaparkan bahwa kegiatan pada strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dilaksanakan secara normatif disesuaikan dengan Dana Pagu Anggaran (DPA) tahun anggaran berjalan. Setiap kegiatan pada strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan mampu menarik perhatian masyarakat sebab cara penyajiannya tidak terlalu formal dan lebih luwes pembahasannya. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi keterbatasan BPLH dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sebab semua kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan terpaku pada anggaran yang ditentukan sehingga tidak fleksibel dalam pelaksanaannya.

Harapan dari strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dapat menyeluruh dan menyentuh semua elemen masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kegiatan yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang begitu banyaknya. Y menegaskan dalam pemilihan tempat kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan tidak melihat segmen buruk atau cukup baiknya pembangunan kota berbasis lingkungan, yang terpenting dari setiap kelurahannya sudah terjamah oleh relawan atau masyarakat yang menjadi kader penggiat lingkungan. Berdasarkan hasil observasi

yang dilakukan oleh penulis, kegiatan-kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah baik, akan tetapi dalam partisipasi masyarakatnya dalam beberapa kegiatan masih kurang optimal serta aktualisasinya belum menyeluruh.

Relevansi bentuk kegiatan dan permasalahan yang dialami lingkungan Kota Bandung tentu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Y memaparkan bahwa dapat dikatakan relevan atau tidaknya bentuk kegiatan yang sudah terealisasi dengan upaya perbaikan Lingkungan Kota Bandung belum seluruhnya dapat dikatakan relevan, sebab BPLH belum melaksanakan evaluasi setelah kegiatan sehingga masih kurang terhadap pemantauan dari penyadaran masyarakat dalam perbaikan lingkungan Kota Bandung. Y juga menegaskan bahwa untuk mengetahui sejauh mana bentuk-bentuk kegiatan pada strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan telah mengarah kepada penyadaran masyarakat untuk memiliki tanggung jawab dalam memelihara lingkungan Kota Bandung, diperlukan kerjasama para ahli untuk mengukur bagaimana perubahan kualitas udara, air dan tanah yang diindikasikan sebagai salah satu perubahan *mindset* dan tanggung jawab dalam lingkungan. Hal tersebut menjadi indikator dari perubahan perilaku masyarakat yang secara sederhana dapat dilihat melalui berkurangnya tumpukan sampah di Kota Bandung dan kualitas air di Kota Bandung sedikit membaik secara berkala.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan semua kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik, hanya saja implikasi dari pelaksanaan program tersebut belum optimal dalam menumbuhkan *civic responsibility* terhadap lingkungan. Hal tersebut terlihat dari implikasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang belum terlihat dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung. Hal tersebut juga didukung oleh keterlibatan seluruh



masyarakat yang belum maksimal, masih ada masyarakat yang tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

## **2. Hasil Yang Dicapai Dalam Pelaksanaan Strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan (sustainable city)**

Proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian dalam suatu perubahan peristiwa atau perkembangan tentang sesuatu. Sebelum membicarakan hasil, kita harus mengusahakan dulu prosesnya. Dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung, Y menuturkan bahwa proses yang dilakukan oleh BPLH dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ialah membuat perencanaan dan penentuan target dalam setiap kegiatan yang akan di laksanakan di lapangan. Fokus utama dari kegiatan-kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yakni ingin mengubah *mindset* masyarakat terhadap terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung.

Hal di atas sejalan dengan penuturan Dini (DN) sebagai staff Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) BAPPEDA Kota Bandung, bahwa proses yang dilakukan pertama kali untuk menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung yakni dengan cara mengumpulkan *stakeholder* baik aparat SKPD, relawan, fasilitator yang dibawa oleh BPLH untuk membahas permasalahan yang ada di masyarakat serta memikirkan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kegiatan perkumpulan ini diberi nama “Riungan Warga”. Dalam rangka mendukung strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan fasilitator dari BPLH meminta kelurahan untuk mencari 20 kader lingkungan yang akan membantu

mensosialisasikan kepada masyarakat luas untuk perbaikan Kota Bandung.

Penulis melakukan observasi dalam hal persiapan serta proses pelaksanaan kegiatan pada strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah cukup baik. Itu dibuktikan dari keterlibatan penuh seluruh *stakeholder* BPLH untuk menyukseskan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Akan tetapi pada kenyataan, beberapa kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan masih belum menyentuh semua masyarakat yang ada di Kota Bandung. Tentu saja hal tersebut memiliki pengaruh terhadap ketercapaian tujuan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan itu sendiri.

Menurut masyarakat yang diantaranya AS, YM, dan AM dalam proses implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah cukup baik, hal tersebut ditandai melalui proses sosialisasi yang mereka terima sehingga mampu menarik perhatian masyarakat untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPLH dalam strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Namun berbeda halnya dari penuturan MY dan MM sebagai masyarakat Kota Bandung yang tidak mengetahui bagaimana proses implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan meskipun mereka menuturkan sempat melihat baligho atau spanduk tentang Bandung *sustainable* tersebut.

Dari hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh penulis, terlihat terdapat perbedaan dari sudut pandangan masyarakat terhadap strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini. Beberapa masyarakat mengetahui tentang tujuan diadakannya program ini, tapi sebagian lainnya masih belum mengetahui dari dilaksanakannya strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Hal tersebut membuktikan kurang optimalisasinya sosialisasi yang dilakukan

oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, khususnya di Kota Bandung.

Berdasarkan pernyataan Y, DN sebagai pihak yang mewakili BPLH yang melaksanakan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dan responden dari masyarakat AS, YM dan AM sebagai perwakilan dari masyarakat Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa proses implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah baik. Hal itu ditandai dengan berjalannya proses informasi dan sosialisasi di masyarakat tentang kegiatan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat cukup besar. Hal tersebut sejalan dengan pengamatan penulis yang melihat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan *stakeholder* BPLH sudah cukup baik, meski belum menyentuh semua lapisan masyarakat.

Melaksanakan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan diperlukan kesesuaian antara kegiatan dengan tujuan yang diharapkan pada perencanaan awal. Maka Y dan DN mengemukakan pemaparan yang sama yakni ada kesesuaian antara strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dengan menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung. Tentu hal yang diharapkan dari program ini Kota Bandung dapat menjadi lebih baik lagi, akan tetapi yang menjadi dasar utama strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini ialah perubahan *mindset* dan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya tidak berbudaya lingkungan menjadi masyarakat berbudaya lingkungan.

Berikut pemaparan dari AS, YM dan AM yang menyatakan bahwa implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dirasa sudah cukup sesuai meski belum dapat melibatkan masyarakat lainnya secara menyeluruh. Berbeda halnya dengan penuturan dari MY dan MM sebagai masyarakat Kota Bandung, yang memang tidak mengikuti kegiatan tersebut sehingga belum mampu menilai kesesuaian

atau tidaknya kegiatan dalam hal menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung.

Tidak jauh berbeda dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan. Kegiatan dapat dikatakan belum optimal, karena masyarakat sebagai sasaran dan subyek pada kegiatan belum mampu seluruhnya berpartisipasi dalam strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Konsistensi pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam hal ini sangat diperlukan, karena hal tersebut berdampak pada upaya dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung. Y menuturkan bahwa semua anggota BPLH memiliki konsistensi yang baik dalam pelaksanaan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. strategi ini merupakan hajat akbar pemerintah daerah dalam memperbaiki Kota Bandung. Dalam merealisasikan itu semua diperlukan dukungan dan bantuan dari masyarakat, oleh karena itu setiap kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan selalu melibatkan masyarakat.

Pernyataan tentang konsistensi pada implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dipaparkan juga oleh DN bahwa konsistensi dari bidang KSDA sudah sangat baik, karena selalu melakukan peninjauan dan perjalanan ke lapangan untuk menganalisis secara bertahap bagaimana perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Meski di lapangan masih ditemukan relawan yang belum optimal dalam membantu strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan untuk ditularkan dan disebarakan pada masyarakat luas di sekitar tempat tinggalnya. Berbeda dari hasil observasi

yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Penulis menemukan bahwa masih kurang dan terbilang jarang kontroling yang dilakukan oleh pihak BPLH kepada masyarakat dalam pemulihan lingkungan Kota Bandung.

Sebagai responden yang mewakili masyarakat Kota Bandung AS, YM dan AM menuturkan bahwa sudah terlihat konsistensi yang cukup baik dari BPLH selaku pihak pelaksana karena hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya rangkaian kegiatan dalam proses implementasi pembangunan berkelanjutan. Tanggapan berbeda datang dari MY dan MM sebagai masyarakat Kota Bandung mereka memaparkan bahwa BPLH turun tangan ketika permasalahan Kota Bandung sudah semakin parah, padahal bencana tahunan kerap terjadi. Saat penulis melakukan observasi di lapangan, konsistensi kegiatan yang dilakukan oleh BPLH dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini belum mampu mengubah *mindset* masyarakat dalam menjaga Kota Bandung. Masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan belum mampu melakukan *follow up* di lingkungannya.

Keterlibatan semua pihak amat dibutuhkan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Dalam hal ini Y dan DN mamparkan hal yang senada bahwa keterlibatan semua pihak dalam sukseksi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini sudah sangat baik. BPLH di sini membangun kerjasama dengan semua pihak yang bersangkutan seperti polisi, TNI, dinas-dinas dll. Tidak luput juga keterlibatan aparatur setempat dan masyarakat dalam impelementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Masyarakat Kota Bandung saat berpartisipasi dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan AS, YM dan AM menyatakan bahwa semua pihak baik itu dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah sangat baik, itu ditandai dengan ramai dan membeludaknya partisipasi masyarakat dalam setiap

kegiatan yang diadakan. Dari pihak pemerintah pun selalu menghimbau dan mengajak masyarakat untuk sama-sama peduli akan kebersihan, kelestarian dan keindahan Kota Bandung.

Kejelasan dan fokus pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan Kota Bandung harus menjadi sorotan penting. Seperti yang dipaparkan oleh Y dan DN bahwa strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan merupakan wadah masyarakat untuk dapat mengenal dan peduli terhadap lingkungannya. Dimulai dari strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap lingkungan harus terbangun. Maka BPLH merancang kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat langsung sebagai sasaran utama dalam tercapainya tujuan dari program tersebut.

Untuk fokus pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, Y dan DN masih menuturkan hal yang senada bahwa semua kegiatan difokuskan kepada masyarakat dalam segi perubahan perilaku dan *mindset* masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung. Tujuannya tidak lain ingin menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan Kota Bandung. Akan tetapi, dari temuan penulis saat melakukan observasi di lapangan masyarakat masih belum optimal dalam mengikuti dan berpartisipasi aktif pada kegiatan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Kegiatan juga belum dapat diikuti oleh masyarakat Kota Bandung secara menyeluruh, sehingga berpengaruh terhadap hasil pencapaian pasca kegiatan.

Masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan seperti AS, YM dan AM menuturkan bahwa ada dua hal yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada program tersebut. Pertama, kejelasan pelaksanaan kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan

berbasis lingkungan yakni ingin mengajak masyarakat Kota Bandung dalam membenahi Kota Bandung melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPLH. Kedua, fokus dari pelaksanaan kegiatan dalam program pembangunan berkelanjutan yakni mengubah perilaku masyarakat dalam menumbuhkan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagi masyarakat yang belum mengenal strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan pasti akan sedikit kebingungan jika ditanya apa yang menjadi tujuan dan fokus utama dari program tersebut. Seperti MF dan MM yang belum pernah sama sekali berpartisipasi dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Dalam pengamatan penulis saat observasi, bahwa kegiatan sudah memiliki kejelasan dan fokus yang baik saat pelaksanaan. Hanya saja di sini masih terdapat masyarakat yang belum mengenal atau mengetahui apa itu strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, sehingga kegiatan belum optimal karena belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Bandung khususnya.

Setiap program tidak akan terlepas dari *controlling* dan keberlanjutan secara berkala untuk mengamati sejauh mana perubahan yang terjadi di masyarakat setelah kegiatan. Y menuturkan bahwa untuk upaya pengontrolan dapat dilakukan oleh aparatur masyarakat setempat sebagai tangan panjang dari sukseksi pelaksanaan dari strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan itu sendiri. Nanti kami yang melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan setempat di sana. Sedangkan bidang Kemitraan sendiri tidak ada pemantauan secara berkelanjutan terhadap perubahan perilaku masyarakat. Sub Bidang kemitraan hanya menjalankan kegiatan yang bersifat sosialisasi, normatif dan temporari.

Berbeda halnya dengan bidang KSDA yang dipaparkan oleh DN bahwa upaya *controlling* yang dilakukan ialah setiap masyarakat kelurahan yang akan melakukan “Riungan Warga” maka fasilitator atau

staff KSDA hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk dapat melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungannya. Sedangkan untuk keberlanjutannya secara berkala dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan di masyarakat Kota Bandung dengan cara melakukan pertemuan Riungan Warga yang mana dimaksudkan untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam mengatasi permasalahan lingkungannya. Dari sana masyarakat menyusun rancana aksi atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungannya secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya.

Berdasarkan pemaparan Y dan DN tentang pengawasan dan keberlanjutan dari pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah tergambarkan. AS, YM dan AM yang merupakan responden dari masyarakat Kota Bandung menuturkan bahwa *controllingnya* melalui pihak kelurahan setempat dan relawan yang menyebarkan budaya cinta lingkungan di masyarakat, akan tetapi masih belum optimal. Sedangkan dari segi keberlanjutannya secara kegiatan besar tidak begitu rutin hanya saja dari pihak kelurahan Kota Bandung sendiri dengan 20 orang relawan, satu orang pendamping lokal dan fasilitator selalu melakukan kegiatan peduli dan budaya cinta lingkungan untuk menindaklanjuti strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan memiliki beberapa rangkaian kegiatan di dalamnya. Beberapa kegiatan tersebut diantara ada yang berbentuk sosialisasi, *event* dan ada juga yang berkelanjutan. Untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable*) maka Y dan DN mengungkapkan hal yang senada bahwa respon dari masyarakat terhadap implemtasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sangat baik. Itu dibuktikan dari selalu meningkatnya



partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang diadakan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Jika disimpulkan responden yang berasal dari masyarakat Kota Bandung seperti AS, YM dan AM menuturkan pendapatnya terhadap strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah baik, dari banyaknya program dan keinginan terjun bersama-sama masyarakat sudah mencirikan keseriusan dalam membenahi Kota Bandung ini. Sedangkan MY dan MM memaparkan bahwa *feedback* atau tanggapannya terhadap kegiatan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan masih perlu digencarkan lagi dari bentuk kegiatannya dan cara sosialisasi ke masyarakatnya.

Evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari suatu program, khususnya di sini pada setiap kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Y mengungkapkan bahwa khusus Sub Bidang program, dan informasi dalam melaksanakan kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sangat jarang sekali melakukan evaluasi. Sebab kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi, normatif dan temporari, terkesan lebih seperti *event*. Tidak dilaksanakan secara berkala atau terus menerus. Sedangkan DN memaparkan bahwa proses evaluasi terhadap pelaksanaan program strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan khususnya untuk mengukur ketercapaian tumbuhnya rasa tanggung jawab masyarakat Kota Bandung tidak dapat dilakukan secara langsung. Akan tetapi, harus menunggu untuk beberapa waktu pasca kegiatan supaya dapat terlihat perubahan apa yang nampak dari sikap masyarakat terhadap lingkungannya.

Evaluasi juga diberikan oleh AS, YM, AM, MY dan MM selaku masyarakat Kota Bandung yang mengikuti kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan bahwa kegiatannya sudah bagus dan menarik akan tetapi masih belum

menyeluruh sehingga masyarakat masih saja ada yang belum mengetahui apa itu strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Perlu adanya kader *ecovillage* mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam rangkaian strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Dari berbagai kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dengan berubah *mindset* sebagai tujuannya, maka Y memaparkan bahwa untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan harus melakukan pengamatan atau penelitian langsung kepada masyarakat. Karena butuh proses dan waktu yang tidak sebentar untuk menentukan berubah atau tidaknya perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Sedangkan menurut DN, masyarakat yang semangat dalam perbaikan lingkungan khususnya pasca strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan biasanya melanjutkan dengan cara membentuk swadaya masyarakat, permohonan bantuan ke dinas-dinas atau CSR pada perusahaan-perusahaan yang tidak lain bertujuan untuk membangun sarana fisik untuk lingkungannya.

Masyarakat Kota Bandung yang menjadi responden secara umum memaparkan bahwa masyarakat lebih rutin melaksanakan kerjabakti dan membuat bak sampah untuk penampungan sampahnya, sehingga tidak dibuang lagi sembarangan. Akan tetapi masyarakat mengatasinya masih dengan cara dibakar. Hal tersebut belum dapat dikatakan mampu mengatasi permasalahan lingkungan. Sedangkan berdasarkan pengamatan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa evaluasi dalam tataran internal BPLH sudah berjalan, namun hasil kegiatan belum optimal karena evaluasi pada masyarakat luas sebagai subyek dari program belum dilakukan.

Terkait keberhasilan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, Y memaparkan bahwa belum dapat dikatakan berhasil dalam mengubah perilaku masyarakat seutuhnya.

Karena yang tersulit itu bukan ketika ada programnya, tetapi pasca dari pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini akankah masyarakat dapat lebih sadar dan peduli terhadap lingkungannya atau tidak. Begitupun hal serupa disampaikan oleh DN bahwa strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan belum dapat dikatakan berhasil dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung dalam menjaga lingkungannya. Karena dalam pengamatan kami yang semangat dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan baru sebatas relawan dan aparat kelurahan yang dilibatkan, sedangkan untuk masyarakat secara menyeluruh masih kurang.

Belum berhasilnya kegiatan pada implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dipaparkan senada oleh Y dan DN bahwa masyarakat sudah mampu membuat bak sampah akan tetapi untuk mengurangi sampahnya masih melakukan cara pembakaran. Cara pembakaran tersebut masih dikatakan tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan, sebab terjadi pencemaran polusi. Koordinasi yang dibangun oleh berbagai pihak di masyarakat juga masih kurang, sehingga dalam beberapa kegiatan terlihat kurang optimal. Masyarakat Kota Bandung sendiri menuturkan secara general kegiatan pada implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan belum dapat melibatkan seluruh masyarakat, sehingga perubahannya belum optimal.

Relevansi kegiatan dengan perubahan perilaku masyarakat dituturkan oleh Y dan DN senada bahwa masih sedikit perubahan yang terjadi di masyarakat Kota Bandung, karena partisipasi masyarakat belum menyeluruh. Setelah kegiatan masih belum dilakukan evaluasi langsung kepada masyarakat, maka terlihat *follow up*-nya masih kurang. Pandangan sama diberikan dari masyarakat, relevansi kegiatan dengan hasil masih terpaut jauh. Kemungkinan terbesar sosialisasi atau kegiatan masih belum

dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemantauan hasil perubahan perilaku di masyarakat Kota Bandung masih belum optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan masih belum optimalnya implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan belum mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Adapun masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan masih bersifat parsial dan belum sampai pada tahapan *follow up* pasca kegiatan.

### **3. Kendala dan Upaya yang Dihadapi dalam Melaksanakan Strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan**

Tingkat kesukaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dituturkan oleh Y bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang program, kemitraan dan informasi dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yakni *AM project* di mana kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran yang turun dari Kementerian Lingkungan Hidup. Banyak sedikitnya kegiatan disesuaikan dengan anggaran, kegiatannya tidak berkesinambungan sehingga benang merahnya tidak begitu terlihat. Berbeda dengan penuturan DN bahwa tingkat kesukaran yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ialah masyarakat yang masih berpikir instan, sehingga masih sulit ketika ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan.

Y memaparkan bahwa strategi yang disusun untuk melaksanakan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yakni dengan cara melakukan rapat koordinasi persiapan sebelum kelangsungan kegiatan, membaca kemungkinan hambatan apa yang akan ditemukan di lapangan saat kegiatan beserta solusi yang harus disiapkan. Hal tersebut berkesinambungan dengan pernyataan DN bahwa strategi yang disusun

untuk strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dengan cara membuat percontohan atau demonstrasi tentang lingkungan oleh fasilitator BPLH yang terjun langsung ke masyarakat. Sehingga masyarakat dapat ikutserta/berpartisipasi dalam kegiatan pada strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ke depannya. strategi yang disusun untuk pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, strategi yang sudah dilaksanakan oleh BPLH sudah cukup baik. *Stakeholder* BPLH melakukan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan, baik dengan internal BPLH sendiri atau dengan eksternal (masyarakat). Setiap bidang menjalankan tupoksinya masing-masing, disesuaikan dengan kegiatan apa yang mereka tangani. Meski demikian, dalam pelaksanaannya kerjasama terlihat baik.

Untuk melakukan pembagian tugas yang dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan khusus di internal BPLH, Y dan DN memaparkan bahwa ketika pembagian tugas kita melihat terlebih dulu kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, setelah itu melakukan pembagian tugas sesuai dengan divisi yang harus ada saat pelaksanaan. Biasanya kami menempatkan anggota sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Selanjutnya pelaksana strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam internal BPLH diperlukan adanya loyalitas dari tim untuk bekerja, seperti yang dituturkan oleh Y bahwa partisipasi anggota tim bidang program, kemitraan dan informasi sebagai pelaksana strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sangat baik, karena program ini merupakan hajat akbar Pemerintah kota maka PNS berkewajiban untuk turut terlibat aktif dan membuat kegiatan dengan program tersebut yang langsung diarahkan kepada masyarakat sebagai sasarannya. Begitupun DN memaparkan hal

serupa bahwa tingkat partisipasi anggota tim bidang KSDA saat pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah sangat baik, itu ditandai dengan kehadiran anggota dan cara bekerja dari masing-masing anggota tim saat kegiatan.

Pengawasan harus dilakukan sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Dalam pemaparannya Y menyampaikan bahwa *controlling* pada saat pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan di lapangan dilakukan dengan cara komunikasi dan koordinasi melalui setiap tim pelaksana. Sehingga tidak ditemukan kesulitan yang berarti selama persiapan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan karena koordinasi selalu terjaga. Berbeda dengan bidang KSDA yang *concern* kepada perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan pengawasan DN memaparkan bahwa *controlling* dilakukan secara berkala oleh fasilitator BPLH yang bersangkutan langsung dengan masyarakat, pendamping lokal selaku orang yang ditugaskan oleh aparat kelurahan. Anggota tim lakukan koordinasi yang baik, dengan cara membuka layanan konsultasi atau menghadiri riungan warga dalam pembahasan lingkungan.

Selama strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan berjalan dan internal BPLH sebagai pelaksana dari kegiatan-kegiatan tersebut, Y dan DN memaparkan hal yang senada mengenai *rewarding* dan *punishment* dalam program ini. Y dan DN menuturkan bahwa sejauh ini belum ada *reward* atau *punishment* terhadap anggota tim sebagai wujud kerja tim. Namun khusus untuk kegiatan bank sampah DN menambahkan, *reward* akan diberikan oleh BPLH kepada fasilitator dan kelurahan sebagai yang mewakili masyarakat setempat karena telah berhasil menjadikan lingkungannya jauh lebih baik dan berbudaya lingkungan.

Seluruh anggota tim pelaksana BPLH tentu saja harus mengetahui dengan jelas latar belakang dan tujuan diadakannya strategi pemerintah

kota dalam pembangunan berbasis lingkungan tersebut, hal tersebut diungkapkan Y dan DN sebagai *stakeholder* dari program tersebut. Selain itu Y dan DN pun menuturkan bahwa setiap anggota tim pelaksana strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan jelas mengetahui kondisi Kota Bandung karena mereka dilibatkan dengan masyarakat yang ada dari hulu hingga hilir bantaran Kota Bandung. Sedangkan berdasarkan hasil observasi peneliti, meski kegiatan pada program BPLH sudah terealisasi dan melibatkan masyarakat sebagai subyek sarannya tetap saja masih belum mampu mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan Kota Bandung secara menyeluruh.

Secara umum dalam memilih lokasi tentu harus juga memikirkan kondisi masyarakat sebagai sasaran dari strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan tersebut, maka Y dan DN selaku anggota tim pelaksana mencoba memahami masyarakat. Karena kendala lingkungan masyarakat berbeda-beda, contohnya masyarakat yang dekat dengan sungai yang paling sering terkena musibah banjir tahunan. Sehingga beberapa kegiatan pada strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dilaksanakan di daerah rawan banjir.

Hambatan atau kendala tentu selalu ditemukan dalam proses implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, Y memaparkan bahwa yang menjadi hambatan/kendala khusus dalam Sub Bidang program, kemitraan, dan informasi adalah ada salah satu anggota tim pelaksana yang sulit menerima dengan cepat ketika mendapatkan instruksi/perintah tugas atau ada juga yang sulit ketika harus bekerja dengan orang yang berbeda. Berbeda dengan hambatan yang ditemukan oleh DN dalam bidang KSDA saat pelaksanaan program yakni kekurangan orang saat melakukan kegiatan *monitoring evaluasi* karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan satu-satunya yang bersifat keberlanjutan secara berkala mengamati perubahan perilaku dari masyarakat. Sedangkan dalam observasinya penulis menemukan bahwa

yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan adalah partisipasi masyarakat setelah kegiatan masih kurang dan beberapa bentuk kegiatan masih belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pasti ada sebab dalam munculnya berbagai hambatan/kendala dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Y memaparkan bahwa hambatan yang ditemukannya dalam bidang program, kemitraan, dan informasi ialah cara menerima informasi seseorang yang berbeda-beda, sehingga terjadi *miss-communication* disebabkan multi tafsir dari sumber informasi yang didapatkannya. Berbeda dengan DN di bidang KSDA hambatan/kendala yang ditemukannya karena yang harus terjun dan terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ialah PNS, sehingga yang diluar PNS belum dapat terlibat secara utuh. Sedangkan dalam pengamatan penulis saat melakukan observasi hambatan/kendala yang dihadapi oleh BPLH adalah sosialisasi yang belum menyeluruh dan kegiatan hanya sebatas saat pelaksanaan program saja belum ada pemantauan setelah terealisasinya kegiatan.

Bukan hanya hambatan internal yang ditemukan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini, hal tersebut dipaparkan Y bahwa bidang program, kemitraan, dan informasi mengalami hambatan/kendala eksternal (masyarakat). Dalam beberapa kegiatan yang melibatkan orang-orang pengusaha dan pertenakan mengalami kendala, karena harus menyesuaikan waktu dan keuntungan apa yang didapat oleh mereka. Sebab orang-orang yang memiliki usaha maupun bekerja memikirkan bahwa waktu adalah uang, sehingga jika diajak berkumpul dalam kegiatan pada strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan agak sedikit sukar. Mereka lebih terfokus dengan usahanya yang tidak bisa ditinggalkan, ketimbang dengan harus mengikuti kegiatan lingkungan.



Berbeda halnya dengan hambatan/kendala yang ditemukan oleh DN di dalam internal bidang KSDA, beliau menuturkan fokus dari bidang KSDA sendiri adalah kegiatan *monitoring evaluasi* untuk memberikan bimbingan teknis kepada relawan dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian dari Kota Bandung, maka sulitnya mencari relawan dari masyarakat yang komitmen dalam membantu sukseksi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Tentu saja ada penyebabnya dari hambatan/kendala yang dihadapi oleh Y dan DN dalam melaksanakan kegiatan. Senada tentang penyebab permasalahan di atas, Y dan DN menuturkan bahwa masyarakat yang memiliki kegiatan atau kesibukan masing-masing, menyulitkan dalam pengaturan jadwal untuk bertemu dengan mereka saat pelaksanaan kegiatan.

BPLH sebagai pelaksana tentu harus melakukan proses evaluasi baik internal dan eksternal dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Y menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan cara melakukan himbauan langsung dari pihak terkuat di sini Walikota sebagai kepala pemerintah kota untuk mengajak masyarakatnya berpartisipasi dalam setiap kegiatan pada strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis mendapatkan bahwa masyarakat hanya sebatas dilibatkan dalam kegiatan pada strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan saja. Akan tetapi pasca kegiatan masyarakat tidak mendapatkan pengawasan atau peninjauan kembali dari BPLH mengenai perubahan sikap serta *mindset* untuk peduli terhadap lingkungan.

Sejalan dengan pembahasan di atas maka DN pun memaparkan proses evaluasi baik internal dan eksternal dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam bidang KSDA. DN memaparkan bahwa evaluasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal ialah dengan cara koordinasi dan saling membantunya seluruh anggota bidang di BPLH maupun SKPD lainnya dalam

pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Sedangkan evaluasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan eksternal dengan cara melakukan koordinasi dengan aparat kelurahan, relawan untuk mempererat barisan kerjasama dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan tentang proses evaluasi baik internal dan eksternal dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, sudah cukup baik. Akan tetapi evaluasi hanya sampai pada tataran internal anggota tim BPLH saja, belum sampai *follow up* pada masyarakat setelah kegiatan. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap hasil ketercapaian tujuan di lapangan, khususnya masyarakat Kota Bandung dalam mengubah *mindset* dan perilaku untuk lebih peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung.

Evaluasi perlu disertai dengan tindak lanjut atau *follow up*, agar ada perbaikan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Seperti pemaparan Y yang menyatakan bahwa *follow up* dari hasil evaluasi dilakukan dengan cara menghubungi semua pihak aparat setempat untuk sama-sama melakukan koordinasi. Berbeda dengan DN, yang menuturkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan dalam anggota timnya adalah meningkatkan koordinasi dan membagikan *jobdesc* yang lebih jelas untuk mengatasi setiap hambatan tersebut. Penulis menambahkan hasil pengamatan observasi, bahwa *follow up* dari evaluasi belum maksimal itu terlihat dari evaluasi yang baru sekadar sampai tataran internal BPLH saja, belum menyentuh masyarakat.

Solusi yang diambil oleh Y untuk mengatasi hambatan/kendala baik yang berasal dari internal maupun eksternal yakni solusi untuk menangani internal, dilakukannya sistem kerja saling *memback-up* agar semua pekerjaan tidak ada yang keteteran atau kewalahan dan solusi

untuk menangani eksternal, semua pihak dilibatkan agar koordinasi dan dukungan pada setiap kegiatannya optimal. DN memaparkan hal berbeda yakni solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan/kendala dalam proses pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, untuk internal semua bidang tetap saling membantu akan tetapi berjalan sesuai dengan *jobdesc* dan tupoksinya masing-masing. Untuk eksternal *stakeholder* masyarakat harus memiliki komitmen yang baik dengan cara dilakukan pembinaan agar terbangunnya kesadaran dalam mendukung masyarakat untuk berbudaya lingkungan pada strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini.

Penulis saat melakukan observasi di lapangan menemukan bahwa efektivitas sistem kerja saling *back-up* cukup baik untuk dilaksanakan, hanya saja kekurangannya beberapa anggota memiliki beban kerja lebih berat saat pelaksanaan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Dalam mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat Kota Bandung diperlukan pengawasan dan pembinaan yang kontinui, karena sulit mencari masyarakat yang memiliki komitmen baik untuk sama-sama mewujudkan tujuan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini.

Tentu ada langkah-langkah pengambilan solusi terhadap hambatan/kendala dalam proses pelaksanaan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Y dan DN memaparkan senada bahwa yang menjadi langkahnya dalam memilih solusi yakni melakukan rapat koordinasi internal, mengevaluasi kekurangan disetiap kegiatan dan melakukan komunikasi intens dengan pihak-pihak yang bersangkutan pada strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan khususnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Begitu penulis menambahkan berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa rapat koordinasi merupakan langkah pengambilan solusi yang baik untuk setiap permasalahan.

Solusi yang sudah diambil tentu saja perlu direalisasikan pada saat implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Y menuturkan bahwa upaya merealisasikan solusi yakni dengan cara melakukan survey lokasi pelaksanaan dan merangkul semua *stakeholder* yang berpengaruh pada suksesi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Sedangkan DN memaparkan upaya untuk merealisasikan solusi yang sudah disepakati dengan cara membuat *time schedule* oleh masing-masing pihak yang sudah diberikan tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap permasalahan agar terperinci dan terencana secara baik. Penulis menambahkan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, meski internal BPLH sudah mencoba untuk merealisasikan solusi, akan tetapi di lapangan masih terhambat dengan kendala yang tidak terduga.

Penerapan solusi pasti memiliki implikasi terhadap perubahan perilaku masyarakat Kota Bandung dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung. Y menjelaskan bahwa Solusi yang sudah terealisasi belum tentu memiliki banyak implikasi dalam perubahan perilaku masyarakat. Tetap saja harus ada *controlling* secara berkala kepada masyarakat, itu dilakukan oleh bidang KSDA BAPPEDA. Dan DN menuturkan bahwa respon masyarakat menjadi lebih baik, ada koordinasi yang lebih jelas, bahkan kader yang dipilih oleh pihak kelurahan kebanyakan melakukan konsultasi langsung dengan mendatangi kantor BPLH.

Terdapat indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya untuk mengatasi kendala/hambatan dalam proses implementasi pembangunan berbasis lingkungan. Y menuturkan tingkat keberhasilan dalam mengatasi kendala/hambatan dapat dilihat dari berkurangnya *miss-communication* anggota tim pelaksana, koordinasi yang lebih baik dari kegiatan ke kegiatan berikutnya. Sedangkan DN memaparkan sedikit ada peningkatan, hal itu ditandai dengan diadakannya aktivitas masyarakat

yang lebih banyak terhadap lingkungan dan perubahan fisik dalam membangun sarana pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil pengamatan observasi di lapangan, yang menjadi kendala atau hambatan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan adalah optimalisasi sosialisasi yang masih kurang dari anggota tim internal (BPLH) sebagai pelaksana kepada eksternal (masyarakat Kota Bandung), sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakatnya kurang. hal tersebut berpengaruh terhadap hasil ketercapaian.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi serta menuangkan hasil penelitian ke dalam deskripsi hasil penelitian, langkah selanjutnya adalah mengkaji serta menganalisis lebih mendalam terhadap hasil penelitian yang berhubungan dengan “Strategi Pemerintah Kota dalam Pembangunan Berbasis Lingkungan”. Agar lebih fokus dalam melakukan analisis maka pembahasan ini dibatasi dan disesuaikan dengan masalah-masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini melalui rumusan masalah. Berdasarkan masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka penulis menemukan gambaran sejauh mana strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan ini dilaksanakan. Agar keabsahan analisis ini mendapatkan tingkat keterpercayaan yang tinggi maka dilakukan analisis mendalam dan ditunjang oleh pendapat para ahli yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

#### **1. Bentuk Strategi Pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan**

Sebuah program pemerintah yang dilaksanakan tentu saja harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan serangkaian proses yang sistematis mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan sekaligus evaluasi tersebut.

Sejalan dengan pendapat Stephanie (dalam Husein Umar, 2001, hlm. 286) yang mengungkapkan maksud dari dibuatnya sebuah strategi. Dalam pandangannya strategi dianggap sebagai suatu proses penentuan rencana para *stakeholder* pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Berkenaan dengan hal tersebut, strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dilaksanakan oleh BPLH Kota Bandung mesti didasarkan atas permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kualitas udara, air, tanah dan meningkatnya tumpukan sampah di Kota Bandung. Fenomena ini merupakan “cerita lama” yang belum mampu diatasi sampai saat ini baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, terbukti dengan semakin tercemarnya dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya lingkungan di Kota Bandung. Diindikasikan hal tersebut terjadi karena belum tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat dalam menjaga lingkungan. Maka diusunglah strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan untuk dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran utamanya. Oleh karenanya, strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dibuat sedemikian rupa melalui kegiatan-kegiatan menarik dengan tujuan untuk memudahkan upaya mengubah *mindset* masyarakat dari yang belum berbudaya lingkungan menjadi masyarakat yang berbudaya lingkungan. Artinya, strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kompetensi “*civic responsibility*” atau tanggung jawab warga negara terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dalam pembahasan ini akan dikupas secara mendalam berkenaan dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam menumbuhkan *civic responsibility* terhadap lingkungan, yang dalam hal ini Kota Bandung. Agar memudahkan dalam pembahasan, maka

penulis memfokuskan permasalahan terlebih dahulu melalui triangulasi data berdasarkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data**

**Strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan**

No.	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Studi Dokumentasi
1.	<p>Bentuk-bentuk kegiatan pada Strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, diantaranya:</p> <p>a. Pengendalian dan pencegahan polusi udara yang bersumber dari sumber pencemar bergerak maupun tidak bergerak lebih diarahkan kepada peningkatan kesadaran <i>stakeholder</i> lingkungan melalui pembinaan dan monitoring.</p> <p>b. Pengendalian pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan dampak negatif perubahan iklim diarahkan kepada pembinaan, penanganan pengaduan permasalahan lingkungan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan semua</li> <li>2. kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik, hanya saja implikasi dari pelaksanaan program tersebut belum optimal dalam menumbuhkan <i>civic responsibility</i> terhadap lingkungan.</li> <li>3. Hal tersebut terlihat dari implikasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang belum terlihat dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung.</li> <li>4. Hal tersebut juga didukung oleh keterlibatan seluruh masyarakat yang</li> </ol>	<p>Studi dokumentasi dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan terkait urgensi sebuah strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sebagai faktor pendorong untuk menumbuhkan <i>civic responsibility</i> terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung. Pada Pasal (70) BAB XI Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan</p>

	<p>monitoring tindak lanjut rekomendasi permasalahan lingkungan.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi <i>stakeholder</i> lingkungan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah.</p> <p>e. Melakukan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sehingga permasalahan sampah dapat teratasi dan bermanfaat ekonomi.</p> <p>f. Meningkatkan pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah.</p> <p>g. Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam yang mengalami pencemaran maupun kerusakan sehingga tetap lestari dan kembali berfungsi dengan</p>	<p>belum maksimal, masih ada masyarakat yang tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.</p>	<p>Lingkungan Hidup disebutkan:</p> <p>(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Peran masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan sosial;</li> <li>b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau;</li> <li>c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.</li> </ol> <p>(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;</li> <li>c. Menumbuhkan embangkan</li> </ol>
--	--	---	--



	baik.		kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuhkan perkembangan ketanggapsediaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan; e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
--	-------	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2017

Berdasarkan hasil triangulasi data di atas, maka dapat diperoleh gambaran mengenai perbandingan dan keterkaitan antara bentuk-bentuk kegiatan dalam strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dengan upaya menumbuhkan *civic responsibility* terhadap lingkungan pada masyarakat Kota Bandung. Setelah mempelajari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bentuk-bentuk kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan seyogyanya selain bertujuan untuk mengubah *mindset* masyarakat terhadap pemulihan Kota Bandung, juga harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan program tersebut. Akan tetapi dari hasil observasi, justru pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini belum dapat dikatakan optimal karena tingkat partisipasi seluruh masyarakat Kota Bandung belum maksimal. Hal

itu ditandai oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar hanya diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari setiap unsur saja, sedangkan hasil keikutsertaan mereka belum disampaikan secara maksimal terhadap masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan. Tentu saja hal ini mempengaruhi keberhasilan program dalam mencapai tujuannya.

Senada dengan pendapat Darryl Force (dalam Sumintarsih, 1991, hlm. 15) yang menitikberatkan pada keterlibatan manusia dalam upaya mempertahankan keutuhan lingkungannya. Pendapatnya menekankan bahwa masyarakat harus dapat berperan dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sebab manusia merupakan makhluk yang dibekali oleh pengetahuan, tujuan, kepercayaan dan nilai-nilai. Maka dari itulah, apabila program ini hanya diikuti oleh perwakilan dari beberapa unsur saja, maka perlu ada transformasi pengalaman dari masyarakat yang mengikuti kegiatan terhadap masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan secara langsung. Hal ini sangat berpengaruh tentunya terhadap hasil yang diharapkan mengenai penanaman tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) khususnya masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan Kota Bandung. Sebab, mengacu kepada pendapat Widagdho (1991, hlm. 144) mengenai makna tanggung jawab yang dianggap sebagai bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud keputusan sikap atas sesuatu hal yang terjadi di lingkungannya, maka perlu perwakilan dari unsur yang mengikuti kegiatan untuk menyampaikan hasil kegiatannya terhadap masyarakat yang lainnya.

Pertama, Pengendalian dan pencegahan polusi udara yang bersumber dari sumber pencemar bergerak maupun tidak bergerak lebih diarahkan kepada peningkatan kesadaran stakeholder lingkungan melalui pembinaan dan monitoring. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mensosialisasikan serta memberikan arahan kepada pihak yang terlibat agar mengenal serta mendukung strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Kegiatan tersebut memiliki tujuan agar pihak-pihak yang dilibatkan dapat mengerti bahwa segala bentuk perilaku atau tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari memberikan implikasi terhadap Kota Bandung. Pada saat pelaksanaan kegiatan

masyarakat hadir dan mengikuti serangkaian acara yang ada. Sebagian besar masyarakat ternyata belum mengetahui strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, hal itu ditandai dari pertanyaan yang mereka ajukan, serta harapan dan masukan mereka terhadap strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang masih kurang dalam pemahamannya dari tujuan program tersebut. Masyarakat mengharapkan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di masyarakat secara instan. Hal itu menandakan bahwa masyarakat masih kurang terhadap keterlibatannya dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang ada di wilayah mereka tinggal.

Sejalan dengan pembahasan di atas, Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 19) memberikan pandangannya mengenai warga negara yang baik. Pendapatnya menekankan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui kewajibannya, memiliki sifat keutamaan dan kebajikan. Maka dari itulah, seyogyanya masyarakat menunjukkan partisipasinya dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan Kota Bandung. Masyarakat dalam kegiatan ini diarahkan untuk menjadikan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sebagai prioritas dalam memperbaiki kondisi Kota Bandung yang semakin parah. Idealnya saat pemerintah memiliki program untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, maka saat proses sosialisasi dan pelaksanaan program tersebut seharusnya masyarakat berpartisipasi aktif untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya, setelah kegiatan tersebut terealisasi masyarakat masih kurang optimal dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap Kota Bandung. Hal tersebut dapat dilihat dari keinginan masyarakat yang masih bergantung pada pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk bertindak dalam mengatasi permasalahan Kota Bandung. Upaya dari kegiatan tersebut dalam mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat masih belum optimal. Terbukti dari tingkat partisipasi masyarakat yang kurang dan belum adanya proses lebih jauh

untuk menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan.

Kedua, kegiatan Pengendalian pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan dampak-dampak negatif perubahan iklim diarahkan kepada pembinaan, penanganan pengaduan permasalahan lingkungan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi permasalahan lingkungan. pengembangan kelurahan berbudaya lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pengendalian pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan disosialisasikan kepada masyarakat, pelaku usaha, tokoh agama, LSM, aparat pemerintah, dll sebagai salah usaha dari proses implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Terlihat bahwa kegiatan ini menaruh harapan besar agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mandiri untuk bersama-sama menjadikan Kota Bandung *sustainable city*.

Sejalan dengan pembahasan di atas, Hermawan (dalam Jurnal Civicus, 2013, hlm. 1) mengungkapkan pendapatnya mengenai kompetensi kewarganegaraan. Pendapatnya menekankan bahwa yang harus dimiliki oleh warga negara meliputi kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), mengembangkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) serta partisipasi warga negara (*civic participation*). Merujuk pada pendapat Hermawan, warga negara yang menjadi bagian dari masyarakat harus memiliki kompetensi dalam dirinya. Kompetensi tersebut dapat dijadikan modal dasar oleh warga negara dalam menyikapi suatu permasalahan dan memberikan solusi untuk dapat mengatasinya. Pengetahuan, tanggung jawab dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh besar dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah *mindset* serta perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Kegiatan ini diapresiasi dengan baik oleh seluruh unsur masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan Bandung berkelanjutan (*sustainable city*) 2018. Bandung berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis

lingkungan yang memiliki kontinuitas (keberlanjutan) dalam pelaksanaannya. Masyarakat Kota Bandung pada umumnya diberikan pelatihan dan bimtek (bimbingan teknis) dalam pelaksanaan pembangunan berbasis lingkungan di lingkungan masyarakatnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk disebarluaskan kembali kepada masyarakat yang lain agar mampu memahami tujuan dari strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan serta terbangunnya *mindset* peduli akan lingkungan. Sapriya (2002, hlm. 153) mengungkapkan pendapatnya tentang kriteria warga negara. Menurutnya bahwa warga negara harus bisa bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajibannya di masyarakat. Itu artinya, *follow up* dari kegiatan monitoring adalah bagaimana masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan dan bimtek (bimbingan teknis) mengenai pembangunan berkelanjutan dalam strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dapat mempertanggung jawabkan pengetahuan yang didapatnya untuk disebarluaskan pada masyarakat lain. Maka sudah sepatutnya dengan pengetahuan dari hasil penanganan dan monitoring permasalahan lingkungan tentang pembangunan berkelanjutan ditransformasikan lebih luas kepada masyarakat lain. Sebab kompetensi warga negara yang baik perlu dioptimalkan oleh masing-masing individu untuk dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada.

Akan tetapi pada tataran pelaksanaannya kegiatan pencegahan, penanganan dan kerusakan lingkungan di masyarakat belum dapat dikatakan optimal. Masyarakat yang diberikan pemahaman (bimbingan teknis) mengenai pencegahan, penanganan lingkungan dan sosialisasi mengenai strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan belum mampu mentransformasikan yang didapainya kepada masyarakat yang lain. Hal tersebut dibuktikan bahwa beberapa masyarakat Kota Bandung belum mengetahui relawan yang berada di kelurahannya dan bahkan ada yang sama sekali belum mengetahui strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Cogan (dalam Djahiri, 2002, hlm. 92) memberikan pandangannya mengenai indikator-indikator warga negara yang baik. Menurutnya warga negara yang baik memiliki salah satu indikator yakni minat dan keterlibatan dalam *public*

*affairs* (kepentingan umum). Merujuk pada pandangan tersebut, bahwa idealnya masyarakat ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan dia juga memiliki keinginan untuk terlibat dalam tahap pencarian solusi dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaiannya. Seperti permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Bandung yang diberikan program serta pelatihan dan bimtek (bimbingan teknis) oleh pemerintah akan tetapi transformasi dan aktualisasi di lingkungannya belum optimal. Maka dapat ditarik kesimpulan dalam minat dan keterlibatannya untuk kepentingan umum masyarakat Kota Bandung masih kurang. Sosialisasi pencegahan kerusakan lingkungan sebagai salah satu kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan belum optimal untuk menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan.

Ketiga, Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi *stakeholder* lingkungan. merupakan salah satu wadah aplikatif bagi masyarakat yang terangkai implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Tujuan dari pelaksanaan strategi tersebut untuk memperkuat dan mendorong komitmen BPLH untuk mencerdaskan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan, khususnya masyarakat Kota Bandung yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana Kota Bandung. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini tidak terbatas, karena informasi berbagai gerakan lingkungan didemonstrasikan kepada masyarakat di berbagai sarana di Kota Bandung, lebih menariknya lagi strategi tersebut dikemas dengan ceritakan tentang kondisi Kota Bandung yang sakit dapat pulih kembali akibat dari kerjasama masyarakat untuk menjadikannya Bandung sustainable.

Dalam rangkaian strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, kualitas dan informasi sumber daya alam di Bandung sudah mampu menarik partisipasi masyarakat dengan baik. Berbagai gerakan lingkungan dari mulai slogan, wisata alam dan pentas seni dengan tema Bandung *sustainable city* diikuti oleh masyarakat. Saat pelaksanaan penyampaian tujuan, sosialisasi dan pengarahannya dari strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis

lingkungan disampaikan agar dapat ditransformasikan oleh masyarakat yang hadir kepada masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, Brundland (1987, hlm. 5) memberikan pandangan mengenai pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan kota, bisnis, warga negara) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi muda. Beliau menekankan bahwa segala sesuatu harus dipertimbangkan akibatnya, dan berpikir sebelum bertindak merupakan upaya dari tanggung jawab Budihardjo (2005, hlm 29) kota yang berkelanjutan mesti memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali dengan baik . Merujuk pada sudut pandang Brundland dan Budihardjo, kedatangan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bandung sustainable merupakan implikasi dari berpikir bagaimana cara memperbaiki lingkungan yang menghasilkan sebuah tindakan untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Dari hasil pengamatan, respon baik terhadap kegiatan sudah terlihat. Akan tetapi banyaknya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan dan mendiskusikan permasalahan lingkungan belum mampu mengubah *mindset* dan perilaku sebagian masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Idealnya setelah kegiatan selesai, masyarakat mampu mengambil manfaat dan mentransformasikan hal tersebut kepada lingkungannya. Akan tetapi, hal tersebut belum terlaksana secara optimal. Itu ditandai dari masih banyaknya masyarakat yang tidak terlibat dalam menginformasikan sumber daya alam yang harus di jaga dan terdapatnya masyarakat yang tidak mengetahui strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih beranggapan bahwa strategi dengan cara menginformasikan sumber daya alam di Kota Bandung tersebut bersifat *benefit*, atau slogan semata dalam rangka meningkatkan pencapaian pariwisata di Kota Bandung. Perubahan *mindset* masih belum tercapai, dikarenakan orientasi dari sebagian masyarakat menghadiri untuk menikmati fasilitas kegiatan atau ajang kesempatan bertemu dengan Walikota Bandung (Ridwan Kamil), bahkan setelah kegiatan selesai masyarakat kembali

ketempat tinggalnya tanpa berbuat apa-apa seakan kegiatan tersebut hanya sebatas “*ceremonial*” saja. Itu artinya kegiatan Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi stakeholder lingkungan. dalam menumbuhkan *civic responsibility* terhadap masyarakat Kota Bandung belum optimal. Ke depannya hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus, idealnya setelah pelaksanaan kegiatan masyarakat mampu melaksanakan *follow up* manfaat kegiatan ke dalam lingkungannya.

Keempat, Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam yang mengalami pencemaran maupun kerusakan sehingga tetap lestari dan berkembali berfungsi dengan baik dengan program *Forum Groups Discussion* (FGD). FGD merupakan kegiatan yang diusung oleh BPLH sebagai rencana strategis dalam proses implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. BPLH dalam hal ini mencoba untuk melibatkan unsur-unsur dari masyarakat yang memiliki pengaruh besar untuk ketercapaian tujuan dari strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, yakni mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu dalam kegiatan FGD ini BPLH mengundang masyarakat secara umum, para ulama, aparatur pemerintahan, pelaku usaha dan LSM yang ada di Kota Bandung.

Selanjutnya dalam pembahasan kegiatan FGD, Sapriya (2002, hlm. 153) mengemukakan pandangannya tentang karakteristik warga negara. Beliau menekankan dalam sudut pandangnya bahwa warga negara yang baik harus mampu melihat dan mendekati masalah yang ada di kehidupan masyarakatnya. Merujuk pada pernyataan tersebut, warga negara yang baik tidak akan tinggal diam ketika terjadi permasalahan yang kritis di lingkungannya. Oleh karena itu, perlu kiranya partisipasi masyarakat Kota Bandung untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Dalam hal ini *stakeholder* yang mengikuti kegiatan FGD harus menjadi promotor dalam perubahan *mindset* dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya. Tugas dari *stakeholder* itu sendiri mensosialisasikan, mengawasi dan mengarahkan masyarakat agar dapat berperan aktif untuk membenahi Kota Bandung secara bersama-sama.



Mendukung pernyataan di atas, Sumintarsih, dkk (1993, hlm. 15) menyampaikan pendapatnya tentang manfaat lingkungan. Dalam pandangannya menekankan bahwa kekayaan lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu kiranya masyarakat berupaya dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kelesatarian Kota Bandung, serta berupaya dalam perubahan *mindset* masyarakat Kota Bandung untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala bentuk aktivitas manusia bersinggungan langsung dengan lingkungan. Maka dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung salah satunya dapat dilihat dari komitmen *stakeholder* untuk mentransformasikan hasil FGD kepada masyarakat luas.

Dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung, *stakeholder* memiliki peran penting untuk membentuk *mindset* dan perilaku masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Namun realitanya, masih ada *stakeholder* yang belum mampu mentransformasikan tujuan dari implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini kepada masyarakat luas. Hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, atau bahkan sama sekali tidak mengetahui strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini. Oleh karena itu, idealnya *stakeholder* yang dipercayai memiliki pengaruh dalam masyarakat dapat meningkatkan komitmennya dan lebih berupaya untuk menghimbau dan mengajak masyarakat Kota Bandung agar peduli dengan lingkungan di Kota Bandung.

Kelima, Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah. dari serangkaian kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dilaksanakan oleh BPLH untuk memupuk kembali kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di masyarakat Kota Bandung. Tema yang diangkat pada saat pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energi adalah “*Sustainable City*”. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya harus di pertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan

generasi masa mendatang, pembahasan tentang pengembangan *renewable energy* di Kota Bandung. Selain mengandung unsur pendidikan, terdapat kandungan pesan dan nilai-nilai dalam menjaga lingkungan

Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah, dimaksudkan untuk menarik partisipasi masyarakat agar bijak menggunakan dan hemat energi dalam pembangunan kota, masyarakat dapat mengikuti kegiatan pembangunan secara berkeadilan dan harus diintegrasikan dengan kepentingan lingkungan dalam proses implementasi pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Pasal (66) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan, penegasan mengenai pendidikan lingkungan hidup dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal. Kaitannya dengan pembahasan, bahwa pembinaan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan lingkungan hidup melalui jalur informal. Hal ini dikarenakan agar masyarakat lebih mudah mengikuti dan menerima tujuan dari pendidikan lingkungan tersebut.

Seyogyanya ada manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Pam Schille dan Tamer Bryant (dalam Hermawan 2013, hlm. 13) memberikan sudut pandangannya mengenai tanggung jawab warga negara. Dalam pandangannya tanggung jawab merupakan tindakan pengambilan keputusan yang bersifat moral. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kegiatan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energi sesuai kebutuhan merupakan bentuk tanggung jawab dalam upaya menyelesaikan permasalahan lingkungan Kota Bandung dengan cara merangkul masyarakat sebagai subyeknya. Idealnya setelah mengikuti pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energi masyarakat mampu mengambil pesan bahwa energy merupakan titipan dari anak cucu kita yang akan datang, sehingga masyarakat diharapkan bijak dan hemat dalam menggunakannya, lalu mentransformasikan kepada masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Secara kegiatan sudah dikemas dengan menarik melalui pembinaan yang kreatif dan menggugah wawasan, namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan

ini belum menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya dan konsisten dalam proses sosialisasi dari BPLH selaku pihak pelaksana dan *stakeholder* kepada masyarakat yang ada di Kota Bandung. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pembinaan belum dapat memaksimalkan kesadaran masyarakat Kota Bandung dalam menumbuhkan *civic responsibility* terhadap lingkungan Kota Bandung.

Keenam, Melakukan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sehingga permasalahan sampah dapat teratasi dan bermanfaat ekonomi. dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sebagai aksi nyata dukungan dari masyarakat terhadap program tersebut. Adapun beberapa jenis program yang dapat diikuti oleh masyarakat diantaranya, 3R (*reduce, reuse, recylce*), Bank sampah, kawasan bebas sampah dsb. Semua jenis program tersebut dijadikan sebagai wadah antara pemerintah dan masyarakat untuk mensosialisasikan dan mendukung tujuan program untuk menjadikan Kota Bandung bersih, indah, sehat dan lestari bersama-sama.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Pasal (67) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan membantu dalam pembahasan ini. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Merujuk pada isi pasal tersebut, diadakannya kegiatan-kegiatan dalam strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah untuk turut terlibat dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Masyarakat juga memiliki kewajiban yang sama, yakni turut membantu dalam merealisasikan tujuan dari program serta meningkatkan *civic responsibility* terhadap lingkungannya, khususnya masyarakat Kota Bandung terhadap Kota Bandung.

Akan tetapi fakta di lapangan berkenaan dengan kegiatan Melakukan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sehingga permasalahan sampah dapat teratasi dan bermanfaat ekonomi. masih belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dari partisipasi masyarakat belum menyeluruh dalam mengikuti

kegiatan dan bahkan ada yang belum pernah mendengar atau mengetahui strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Idealnya proses sosialisasi perlu ditingkatkan dari tataran pemerintah, dibantu oleh *stakeholder*, penggiat alam dan FGD yang sudah dibentuk, agar informasi dapat ditransformasikan dengan cepat dan baik sebab melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam pembahasan ini, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk program Strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat pada implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sudah baik. Hal tersebut terbukti dengan terealisasinya seluruh kegiatan. Akan tetapi permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini ialah bentuk-bentuk kegiatan pada strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dilaksanakan oleh BPLH belum optimal dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan, sebab partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan masih bersifat parsial. Oleh karena itu, agar tercapainya tujuan dari strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan maka perlu dilakukan perbaikan dalam proses sosialisasi pada setiap kegiatan, agar keterlibatan masyarakat lebih menyeluruh dan optimal.

## **2. Hasil yang Dicapai dalam Pelaksanaan Strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan**

Serangkaian proses yang sistematis dalam perencanaan program sampai dengan tahap pelaksanaan sekaligus evaluasi merupakan upaya dalam mengoptimalkan suatu strategi. Mengukur ketercapaian tujuan dalam sebuah implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kebijakan melalui upaya *controlling* serta terlibat langsung dalam pelaksanaan program di lapangan. Stewart, dkk. (dalam Dun, 2003, hlm. 3) memberikan pandangannya mengenai kebijakan publik. Dalam pandangannya menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat aturan dan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik untuk mencapai tujuan atau cita-cita

bersama. Merujuk pada pandangan tersebut, maka dalam perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan dan evaluasi dari sebuah program tidak lain untuk mengatasi permasalahan demi tercapainya sebuah tujuan bersama.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dalam pembahasan ini akan dikupas secara mendalam berkenaan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam menumbuhkan *civic responsibility* terhadap lingkungan, yang dalam hal ini Kota Bandung. Agar memudahkan dalam pembahasan, maka penulis memfokuskan permasalahan terlebih dahulu melalui triangulasi data berdasarkan teknik pengumpulan data.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data**

No.	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Studi Literatur
1.	<p>1. Berdasarkan hasil wawancara hasil yang dicapai dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dilakukan oleh BPLH sudah berkelanjutan</p> <p>2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLH) Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran terhadap</p>	<p>1. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan masih belum optimalnya implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.</p> <p>2. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kegiatan dalam strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan belum mampu menyentuh semua lapisan masyarakat.</p> <p>3. Adapun masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan masih bersifat parsial dan belum sampai pada tahapan</p>	<p>Suriakusumah (2008, hlm. 293) mengungkapkan faktor-faktor yang menjadikan sukses atau tidaknya sebuah kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa disebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal.</li> <li>2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.</li> <li>3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada, makin banyak yang mendukung maka makin tinggi tingkat kesuksesannya.</li> <li>4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis</li> </ol>

	lingkungan sudah baik, itu terlihat dari kinerja yang dibangun <i>stakeholder</i> internal BPLH dalam mempersiapkan setiap strategi.	<i>follow up</i> pasca kegiatan.	kausalitas terhadap persoalan yang timbul dari pelaksana kebijakan. 5. Para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam tingkat koordinasi.
--	--	----------------------------------	--

*Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2017*

Berdasarkan hasil triangulasi data di atas, maka dapat diperoleh gambaran mengenai perbandingan dan keterkaitan antara hasil yang dicapai dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dengan upaya menumbuhkan *civic responsibility* terhadap lingkungan. Setelah mempelajari pandangan Suriakusumah (2008, hlm. 293) mengenai faktor-faktor yang menjadikan sukses atau tidaknya sebuah kebijakan publik, maka ketercapaian hasil dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan untuk menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung belum dapat dikatakan optimal. Masyarakat yang dijadikan sasaran utama dalam perubahan *mindset* dan perilaku terhadap pembangunan berkelanjutan Kota Bandung dalam partisipasinya masih kurang dan banyak yang belum terlibat aktif, sedangkan hasil keikutsertaan mereka mempengaruhi tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuannya.

Selanjutnya, senada dengan pembahasan di atas Francis (dalam Mitchell 1995, hlm. 4) memberikan sudut pandang mengenai urgensi lingkungan hidup. Pandangannya menegaskan bahwa lingkungan dapat memberikan manfaat atau tidaknya kepada kelangsungan hidup manusia tergantung pada tindakan/perilaku dari manusia itu sendiri. Maka dari itulah, implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung perlu dioptimalkan. Sebab perubahan *mindset* dan perilaku yang menjadi tujuan utama dari program tersebut dapat dijadikan sebagai upaya untuk

menyelamatkan lingkungan tempat mereka tinggal dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat Kota Bandung ke depannya.

Keberhasilan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, belum optimal. Hal itu ditandai masih kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BPLH terhadap masyarakat, masih belum dapat mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat Kota Bandung secara menyeluruh untuk sadar dan peduli terhadap lingkungannya. Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, *World Commission on Environment and Development* (dalam Mitchell 1987, hlm. 28) memberikan sudut pandangnya mengenai karakteristik masyarakat Kota. Sudut pandangnya menitik beratkan pada lingkungan yang akan menjadi korban di mana masyarakat terus menerus berusaha bertahan hidup dengan memenuhi segala kebutuhannya. Berangkat dari pandangan tersebut, jika *mindset* dan perilaku masyarakat Kota Bandung tidak dibangun, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah. Masyarakat akan berusaha dalam mendapatkan manfaat dari lingkungan, sedangkan tidak tahu cara menjaga kelangsungan lingkungan itu sendiri.

Belum optimalnya implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang untuk turut berkontribusi secara aktif pada tataran pelaksanaan di lapangan. Unsur masyarakat yang terlibat pada program ini masih parsial (sebagian), yang merupakan perwakilan atau pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh bagi masyarakat saja. Perubahan *mindset* dan perilaku yang menjadi tujuan dari implementasi program pembangunan berkelanjutan difokuskan pada masyarakat Kota Bandung, seharusnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat lebih luas dan menyeluruh.

Proses sosialisasi dapat menjadi indikator dalam keberhasilan sebuah program. Sosialisasi menjadi kunci banyak tidaknya keterlibatan dan partisipasi dari subyek yang diharapkan. Senada dengan hal tersebut, Suriakusumah (2008, hlm. 293) mengemukakan pandangannya mengenai faktor berhasil tidaknya sebuah kebijakan. Pandangannya menegaskan keberhasilan dari sebuah kebijakan dapat

dilihat dari dukungan atau penolakan dari subyek sasaran kebijakan itu sendiri. Itu artinya, partisipasi dan keterlibatan masyarakat Kota Bandung yang belum optimal dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan menandakan bahwa keberhasilan yang ingin dicapai masih terlampau jauh dari harapan.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat ada hubungannya dengan proses sosialisasi. BPLH sebagai pelaksana program melakukan serangkaian proses sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan tujuan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menarik partisipasi masyarakat, menumbuhkan *civic responsibility*, perubahan *mindset* dan perilaku masyarakat Kota Bandung terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Kota Bandung. Selanjutnya, Suriakusumah (2008, hlm. 293) memberikan pandangannya mengenai faktor tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Pandangannya menegaskan keberhasilan dari suatu kebijakan itu berdasarkan atas ketersediaan waktu dan sumber daya yang mendukung.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPLH belum dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung. Diindikasikan yang menjadi penyebab dari kurang optimalnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat ialah proses sosialisasi yang masih minim. *Stakeholder* yang berasal dari masyarakat Kota Bandung sendiri belum maksimal dalam melakukan transformasi informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Padahal idealnya *stakeholder* mampu melakukan transformasi informasi mengenai strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dengan jauh lebih baik karena mereka melakukan interaksi sosial dengan masyarakatnya setiap hari.

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, Van Meter dan Hon (dalam Budi Winarno, 2002, hlm. 110) mengungkapkan pandangannya mengenai faktor terpenting dalam implementasi kebijakan. Menurutnya pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan publik harus dituntut lebih baik dalam pengaplikasiannya. Maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, kebijakan tersebut harus melibatkan seluruh *stakeholder* terkait. Berkenaan dengan keterlibatan *stakeholder* tersebut, maka peranan



sosialisasi sangat penting. Oleh karena itu, agar diperoleh pencapaian hasil yang maksimal dari pelaksanaan sebuah kebijakan maka harus diawali oleh sosialisasi yang menyeluruh terhadap *stakeholder* yang terlibat.

Selain permasalahan sosialisasi yang kurang optimal, faktor yang menyebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan adalah kesibukan masyarakat itu sendiri. Mayoritas masyarakat Kota Bandung berprofesi sebagai karyawan swasta, karena kawasan Kota Bandung merupakan salah satu kawasan metropolitan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bandung cukup tinggi. Permasalahan yang ditemukan oleh penulis di lapangan adalah masyarakat yang memiliki kesibukan lebih memilih untuk melaksanakan pekerjaannya ketimbang mengikuti kegiatan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Tentu saja hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi BPLH untuk memberikan pemahaman secara substansial terkait strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan meskipun pada kenyataannya sebagian masyarakat tidak mengikuti secara langsung rangkaian kegiatan pada program tersebut.

Senada dengan pemaparan tersebut Sunggono (1994, hlm. 158) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan perlu ada *feedback* baik dari pelaksana kebijakan terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Beliau mengaskan bahwa sebuah kebijakan tentu terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, warga masyarakat sebagai objek perlu memiliki kesadaran hukum untuk mengikuti program tersebut. Meskipun pada konteksnya rangkaian kegiatan dalam program tersebut tidak bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh masyarakat, akan tetapi implikasi kegiatan tersebut ditekankan kepada seluruh masyarakat untuk memiliki *mindset* peduli lingkungan Kota Bandung. Artinya, keikutsertaan masyarakat pada rangkaian kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, sejalan dengan pendapat Bestari (dalam Jurnal *Civicus*, 2009, hlm. 5) bahwa segala sesuatu yang menyangkut upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan sebuah kebijakan mesti ditekankan pada orientasi untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dengan kata lain berdasarkan pendapat tersebut, seyogyanya pelaksanaan kegiatan pada strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan tidak hanya dilaksanakan dengan asumsi “gugur kewajiban” saja, akan tetapi perlu diperhatikan hal-hal yang bersifat fundamental yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dimana kebijakan tersebut dibuat. Pendapat tersebut mendukung terhadap hasil observasi penulis di lapangan yang melihat bahwa pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan pada umumnya dilaksanakan dengan orientasi “gugur kewajiban” saja, yakni hanya selesai pada tataran terselenggaranya kegiatan saja. Hal tersebut dilihat dari tidak adanya *follow up* yang signifikan terhadap tumbuhnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan Kota Bandung. Selain itu, pembentukan kader yang dimaksudkan sebagai pelopor strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini didukung oleh penuturan Y pada saat wawancara serta responden dari unsur masyarakat yang mengungkapkan belum optimalnya pembentukan relawan itu sendiri.

Kurang optimalnya pembentukan relawan di Kota Bandung menyebabkan upaya menumbuhkan *civic responsibility* melalui strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan juga belum optimal. Sebab, Adiwiyoto (dalam Hermawan 2013, hlm. 12) menekankan arti tanggung jawab sebagai upaya mengambil keputusan yang patut dan efektif. Apabila dilihat dari konteks ketidakefektivan kader maka pendapat dari Adiwiyoto tersebut sangat tepat yang mana makna patut dalam hal ini berarti menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial dan harapan umum yang diberikan, untuk memberikan hubungan antar manusia yang positif. Sehingga, apabila kader yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu mensukseskan tujuan strategi pemerintah kota

dalam pembangunan berbasis lingkungan tersebut tidak optimal, maka hasilnya pun akan tidak maksimal pula.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sampai saat ini belum mampu menumbuhkan *civic responsibility* terhadap lingkungan Kota Bandung di Kota Bandung secara keseluruhan. Hal tersebut telah ditinjau dari berbagai faktor yang telah dijabarkan di atas terkait belum optimalnya pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Sebab, Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 45) menekankan karakteristik warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) yakni berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan. Artinya sikap tanggung jawab yang mesti dimiliki masyarakat Kota Bandung dalam menjaga kelestarian Kota Bandung harus dimulai dari partisipasi secara aktif terhadap strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan tersebut secara menyeluruh.

### **3. Kendala dan upaya dalam mengatasinya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLH) Kota Bandung dalam melaksanakan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan**

Mengimplementasikan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang memiliki tujuan untuk mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat Kota Bandung dalam menjaga dan peduli terhadap Kota Bandung tentu tidaklah mudah. Kendala atau hambatan pasti ditemukan saat pelaksanaannya, terlebih strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dalam implementasi sebuah program, tentu saja perlu adanya persiapan dan mentalitas yang baik dari pelaksana program tersebut. Sebab kendala atau hambatan merupakan hal yang lumrah terjadi, diluar dari perencanaan dan sifatnya mendadak tanpa pernah terduga sebelumnya.

Berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BPLH dalam upaya mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat Kota Bandung untuk senantiasa menjaga dan peduli akan lingkungan, belum dapat dikatakan optimal. Kendala atau hambatan dari pelaksanaan kegiatan tersebut muncul dari faktor internal (tim anggota pelaksana) maupun eksternal (masyarakat). Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi literatur yang dilaksanakan oleh penulis dalam penelitian ini.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data**

No.	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Studi Literatur
1.	<p>Hambatan/kendala dalam melaksanakan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, diantaranya:</p> <p>a. Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etos kerja dari sebagian anggota tim pelaksana strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan masih rendah;</li> <li>- Kekurangan SDM dalam beberapa kegiatan;</li> </ul> <p>b. Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak dari perwakilan masyarakat yang diberikan sosialisasi, bimtek (bimbingan teknis) dan pengarahan tentang program serta</li> </ul>	<p>Berdasarkan hasil pengamatan observasi di lapangan, yang menjadi kendala atau hambatan dalam implementasi strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. optimalisasi sosialisasi yang masih kurang dari anggota tim internal (BPLH) sebagai pelaksana kepada eksternal (masyarakat Kota Bandung),</li> <li>2. sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakatnya kurang. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap hasil ketercapaian.</li> </ol>	<p>Studi literatur yang berkenaan dengan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dilakukan terhadap teori analisis Dunn (2003, hlm. 22) sebagai berikut:</p> <p>A. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang</p>

	<p>pelaksanaannya masih belum dapat mentransformasikannya kepada masyarakat luas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya komitmen kader yang membina relawan dari masing-masing kelurahan untuk suksesi tujuan dari program.</li> </ul>		<p>diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakannya, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.</p> <p>B. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dikutip oleh Agustino (2008, h.149) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.</p> <p>C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dapat dijabarkan oleh Bruntland report (IISD, 2010, hlm.4) mengidentifikasi tujuh upaya penting untuk kebijakan pembangunan lingkungan yakni,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memikirkan kembali makna pembangunan</li> <li>b. mengubah kualitas pembangunan</li> </ul>
2.	<p>Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan/kendala strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, diantaranya:</p> <p>a. Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solusi untuk menangani permasalahan di atas yakni dengan cara membuat sistem kerja saling <i>back up</i> untuk menutupi kekurangan SDM dan anggota tim yang beretos kerja rendah dalam mensukseskan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.</li> <li>- Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan strategi pemerintah Kota dalam pembangunan</li> </ul>	<p>Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan internal dengan cara melakukan sistem kerja <i>back up</i> dan rapat koordinasi sudah memberikan perubahan dalam kegiatan selanjutnya menjadi lebih baik. Namun dari masyarakat sendiri, belum terlihat upaya untuk mengatasi setiap kendala/hambatan dalam menumbuhkan <i>civic responsibility</i> masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan, dalam hal ini Kota Bandung.</p>	

	berbasis - - - lingkungan. b. Eksternal: - Belum ada upaya dalam mengatasi kendala/hambatan yang signifikan, maka dari itu internal perlu mengambil langkah lebih jauh.		c. memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air, dan sanitasi. d. menjamin terciptanya keberlangsungan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu. e. mengkonservasi dan meningkatkan sumber daya f. mengubah arah teknologi dan mengelola risiko g. memadukan pertimbangan lingkungan ekonomi dalam pengambilan keputusan
--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengolahan triangulasi data di atas, maka dapat ditarik simpulan informasi bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh internal BPLH dapat ditangani dengan baik. Upaya BPLH untuk memperbaiki setiap kendala atau hambatan yakni dengan cara melakukan evaluasi hasil kinerja. Sementara itu, kendala atau hambatan yang terjadi di masyarakat belum dapat ditangani secara signifikan. *Civic responsibility* yang diungkapkan oleh Sapriya (2002, hlm. 153) menekankan bahwa masyarakat harus mampu mengubah gaya hidup konsumtifnya dan harus mampu menjaga lingkungannya. Maka dari itu hal yang perlu dilakukan dalam tahap mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat adalah menanamkan kesadaran, tanggung jawab serta mensosialisasikan tentang menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan Kota Bandung.

BPLH dalam mengimplementasikan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama kegiatan, perlu kiranya mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.

Kendala atau hambatan yang bersifat teknis atau non-teknis bisa terjadi dari internal BPLH itu sendiri atau eksternal (masyarakat). Maka dari itu, kerjasama tim memiliki implikasi yang sangat berpengaruh pada tingkat ketercapaian tujuan dari program tersebut. Sapriya (2002, hlm. 153) mengemukakan pendapatnya mengenai karakteristik warga negara. Pandangannya menekankan bahwa warga negara yang merupakan bagian dari masyarakat harus memiliki kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif. Merujuk pada pandangan tersebut, BPLH dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dengan tujuan mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat perlu kiranya meningkatkan kerjasama tim dan solidaritas internal.

Penulis saat melakukan wawancara dan observasi mendapatkan sebuah informasi bahwa kendala yang dihadapi oleh BPLH dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ada yang berasal dari internal BPLH dan juga eksternal atau masyarakat. Kendala atau hambatan internal yang ditemui saat proses dan pelaksanaan program, ialah tingkat pemahaman dan cara kerjasama tim yang berbeda-beda dari masing-masing orang. Dari seluruh *stakeholder* BPLH, dalam persiapan perencanaan hingga proses pelaksanaan program masih ditemukan anggota tim yang kurang cepat tanggap dalam menjalankan instruksi. Hal tersebut diindikasikan karena tingkat pemahaman akan arahan dan cara berpikir anggota tim terhadap sesuatu tidak selalu sama. Ada yang mudah mengerti dan cepat tanggap ketika mendapatkan instruksi, tetapi ada juga yang sebaliknya. Itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dari internal BPLH.

Selanjutnya, Adiwiyoto (dalam Hermawan 2013, hlm. 12) mengemukakan pendapatnya mengenai arti tanggung jawab. Dalam sudut pandangnya tanggung jawab merupakan sikap patut dan efektif untuk memberikan hubungan yang positif diantara manusia. Berdasarkan pandangan tersebut, maka proses implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan sebelum mampu melibatkan masyarakat luas di dalamnya untuk mencapai tujuan program, perlu juga terpatri sikap tanggung jawab dari pelaksana program itu sendiri yakni *stakeholder* BPLH. Dalam mengemban tugas

yang diberikan harus juga didasari dengan tanggung jawab, sehingga semua pekerjaan anggota tim pelaksana dapat berjalan dengan baik.

Ketercapaian tujuan dari sebuah program tidak terlepas dari bagaimana tanggung jawab dan komitmen yang baik dari pelaksana program tersebut. Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, Cogan (dalam Djahiri, 2002, hlm. 92) memberikan sudut pandangya mengenai indikator warga negara yang bertanggung jawab. Dalam sudut pandangya menegaskan bahwa warga negara yang baik memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. BPLH sebagai pelaksana strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dalam menumbuhkan *civic responsibility* masyarakat Kota Bandung perlu kiranya menjalankan sebagai tugas yang menjadi kewajibannya dengan didasari dengan rasa tanggung jawab. Hal tersebut akan menunjang pada etos kerja dari anggota tim pelaksana program itu sendiri.

Kendala atau hambatan eksternal yang ditemukan BPLH di lapangan ternyata mempengaruhi terhadap ketercapaian dari tujuan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPLH melalui orang-orang atau perwakilan serta pihak-pihak bersangkutan dari masyarakat yang diharapkan dapat membantu dan mendukung strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ternyata belum optimal. Ditandai dengan masih ditemukannya pihak-pihak atau kader yang tidak melakukan transformasi informasi mengenai strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan kepada masyarakat lain, sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan masih kurang.

Selanjutnya, Joyosuharto (1989) mengemukakan pandangannya mengenai masyarakat kelurahan. Pandangannya menjelaskan bahwa masyarakat kelurahan memiliki hubungan yang lekat dengan alam dan lingkungannya. Itu artinya interaksi sosial masyarakat kelurahan lebih kuat, seharusnya pihak-pihak yang sudah berkomitmen dan dibekali dengan bimtek (bimbingan teknis) dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dapat melakukan transformasi informasi dengan baik kepada masyarakat lainnya. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan masih kurang, *follow up*



dari hasil kegiatan masih belum terlihat, sosialisasi yang terbatas menyebabkan masih adanya masyarakat Kota Bandung yang belum mengetahui strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan.

Ada beberapa kegiatan dalam program pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah yang banyak. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BPLH yakni kekurangan orang untuk melakukan kegiatan tersebut. Meski kegiatannya terealisasi, akan tetapi pencapaian tujuannya masih belum optimal. Ada ketentuan dari Pemerintah Kota Bandung bahwa yang harus menjadi pelaksana kegiatan dalam strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan harus PNS, maka BPLH tidak dapat melakukan perekrutan di luar non-PNS untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

Berbagai kendala atau hambatan yang terjadi dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan perlu ditangani secara sigap. Maka BPLH sebagai pelaksana program harus berupaya untuk mengatasi setiap kendala atau hambatan yang ada. Jika kendala atau hambatan tidak mampu di atasi, maka akan berimplikasi terhadap hasil pencapaian tujuan pada strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan ini. Anderson (dalam Sunggono, 1994, hlm. 144) memberikan sudut pandangnya mengenai kebijakan publik. Menurutnya perlu ada ketegasan bagi pelaksana kebijakan berupa sanksi atau *punishment* apabila tidak dapat melaksanakan dengan baik. Berangkat dari pandangan tersebut, dalam implementasi kebijakan publik dibutuhkan aturan yang tegas dari pelaksana maupun partisipan.

Tingkatan etos kerja yang dimiliki oleh anggota tim BPLH yang berbeda menjadi salah satu kendala dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam tataran persiapan. Ada anggota yang mudah mencerna informasi dan melaksanakan sebuah instruksi dengan cepat, ada pula yang lambat dalam mencerna informasi dan menyelesaikan tugasnya setelah mendapatkan instruksi. Terkadang hal itu menjadi kendala atau hambatan dalam persiapan teknis implemntasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan di lapangan. Maka dari itu, perlu kiranya pendampingan kerja dan saling mengingatkan antara anggota tim dalam menjalankan kewajibannya untuk

persiapan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan, karena hal tersebut dapat memperkecil kendala atau hambatan saat pelaksanaan.

Selanjutnya, Suriakusumah (2008, hlm. 293) memberikan pandangannya mengenai faktor-faktor yang menjadikan sukses atau tidaknya sebuah kebijakan publik. Menurut pandangannya bahwa salah satu yang menjadi faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik adalah pelaksana kebijakan publik itu sendiri. Dalam hal ini pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan menganalisis kausalitas terhadap persoalan yang akan ditemukannya di lapangan ketika mengimplementasikan strategi tersebut. BPLH dalam tataran persiapan dan pelaksanaan harus terfokus pada tujuan dari strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Masyarakat dituntun untuk mengubah *mindset* dan perilakunya agar lebih peduli terhadap lingkungan Kota Bandung.

Adapun kendala ataupun hambatan lain yang ditemukan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam implementasi program ini cukup banyak. Hal ini terbukti dari kurang optimalan proses sosialisasi disebabkan BPLH kekurangan personil di lapangannya untuk menginformasikan serta mengajak masyarakat dalam berpartisipasi pemulihan Kota Bandung. Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 46) mengemukakan cara pandangannya mengenai tanggung jawab (*civic responsibility*). Dalam pandangannya menegaskan warga negara perlu memiliki sikap tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat dan lingkungannya. Itu artinya setiap warga negara yang menjadi bagian dari masyarakat perlu kiranya memupuk kesadaran dan sikap tanggung jawabnya dimulai dari diri sendiri, lalu ditularkan kepada masyarakat lain, maka hal tersebut akan berdampak baik pada lingkungannya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, BPLH yang memiliki sumber daya manusia terbatas untuk melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat Kota Bandung harus mampu menumbuhkan *civic responsibility* terhadap hal apa yang sedang dijalaninya sekarang. Optimalisasi jumlah anggota tim yang bertugas bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu ditingkatkan. Yang terpenting tujuan dan *mindset* peduli yang ingin dibangun

terhadap Kota Bandung ini tersampaikan dan mampu diaplikasikan masyarakat dengan baik. Mengoptimalkan jumlah sumber daya manusia yang terbatas jauh lebih baik, dari pada jumlah sumber daya manusia yang banyak akan tetapi aktualisasi di lapangannya kurang, hasilnya akan lebih disayangkan.

Sosialisasi dan bimtek (bimbingan teknis) terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan Kota Bandung yang diberikan kepada masyarakat akan menjadi modal dasar masyarakat dalam bertindak. Masyarakat mengikuti berbagai kegiatan dalam implementasi strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan harus berdasarkan pada kesadaran, rasa tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi pembangunan berbasis lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap lingkungannya, lebih spesifik lagi Kota Bandung. Meski di lapangan masih terdapat beberapa unsur masyarakat dan kader yang belum konsisten serta komitmen dalam pelaksanaan program ini, seharusnya hal itu tidak menjadi halangan yang berarti di masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat dalam sosialisasi atau pelaksanaan kegiatan, seharusnya mampu bertindak cerdas dan inisiatif untuk mengenali dan mengetahui permasalahan apa yang terjadi di lingkungannya.

Berangkat dari pembahasan sebelumnya, Darrly Force (dalam Sumintarsih, 1991, hlm. 15) mengungkapkan pendapatnya mengenai tanggung jawab masyarakat. Menurut pandangannya tanggung jawab masyarakat terbangun melalui pola-pola kebudayaan dan pengetahuan yang dimilikinya. Terbangunnya tanggung jawab masyarakat dipengaruhi juga oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tanggung jawab dapat menjadi budaya apabila masyarakatnya sendiri membudayakan hal tersebut serta didorong dengan pengetahuan. Masyarakat harus cerdas dalam berpikir dan bertindak, khususnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Belajar untuk lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap pemerintah yang memiliki keterbatasan dalam bertindak.

Berdasarkan hasil pemaparan dan analisis di atas, maka dapat ditegaskan bahwa semua hambatan yang dihadapi oleh BPLH dalam proses implementasi

pembangunan berbasis lingkungan belum mampu diselesaikan dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan. Perlu adanya *follow up* melalui langkah konkrit agar tujuan dari strategi pemerintah Kota dalam pembangunan berbasis lingkungan dapat tercapai. Hermawan (dalam Jurnal *Civicus*, 2013, hlm. 1) mengemukakan pandangannya mengenai kompetensi warga negara. Menurut pandangannya bahwa kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), tanggung jawab warga negara (*civic reponsibility*) dan partisipasi warga negara (*civic participation*) merupakan cermin warga negara yang baik. *Good citizen* dapat terlihat dari kemampuannya untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam setiap kebijakan atau strategi yang dijalankan oleh pemerintah.